

Olly Dondokambey: Membangun Indonesia dari Pinggiran

# AKTUAL

Edisi 45 | 2 - 16 Desember 2015

## #FREEPORTBIKINREPOT

Ini momentum tepat untuk menasionalisasi Freeport



ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM



# LHT

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،  
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Present :

## PROMO TERBAIK UMROH 2016!

### Paket Umroh 9 Hari

Berangkat :

27 Januari - 4 Februari 2016

Dengan :

الإتجاه

ETIHAD  
AIRWAYS



START FROM :

\$ 1.650

ALL IN

Hotel :

Madinah : al-Mukhtara International / Setaraf  
Makkah : Dar al-Eiman al-Zahabi / Setaraf

#### Paket Sudah Termasuk :

1. Tiket Pesawat
2. Hotel Makkah & Madinah
3. Makan Fullboard
4. Visa Umroh
5. Ziarah / City Umroh
6. Tour Leader
7. Ustaz Pembimbing
8. Manasik Umroh
8. Air Zam-zam
9. Bagasi
10. Perlengkapan Umroh

#### SYARAT :

1. Fotokopi KK, KTP, Buku Nikah atau Akta Lahir / Ijazah Terakhir (Lajang)
2. Passport
3. Buku Kuning
3. Pas Foto 4 x 6 ( 5 Lembar )

#### Paket Belum Termasuk :

1. Pembuatan Passport
2. Buku Meningitis
3. Laundry, belanja pribadi
4. Biaya pengiriman perlengkapan Umroh untuk luar DKI Jakarta

Contact Us



021-8292931

0813 813 812 67 - 0812 8067 5659

✉ laksmi\_p@yahoo.com



PT. LAZUARDI HARMONI TUR

Jl. Tebet Barat Dalam VI No. 8 Tebet  
Jakarta Selatan 12810



*Kepuasan, kenyamanan dan rasa aman Anda merupakan prioritas dan tanggung jawab kami. Untuk itu, kami akan selalu memenuhi kebutuhan Anda agar mendapatkan pelayanan yang terbaik.*

**PENDIRI** M Danial Nafis  
**KOMISARIS** Yudi Latif  
**PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief  
**SEKRETARIS REDAKSI** Tsurayya Zahra  
**REDAKTUR SENIOR** Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi  
**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony  
**REDAKTUR** Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)  
**ASISTEN REDAKTUR** Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan  
**STAF REDAKSI** Soemitro, Fadlan Syam Butho, Maulana Khama Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Muhammad Fikry Hizbullah, Novrizal Sikumbang, Dadang Sah, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Muhammad Fikry Hizbullah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, Nelson Nafis

**NETWORK:** Tri Wahyudi (Hd), Rendra  
**SMC:** Imelda, Taufik, Iqbal Maulana, Muhamad Farisi

**KONTRIBUTOR LUAR NEGERI** Fitra Ismu (Meksiko)

**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Vina Fatma Sari (Bandung), Labib Zamzani (Yogyakarta)

**DIREKTUR OPERASIONAL** Rinrin Sukmariana

**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah

**STAF KEUANGAN** Zulkarnain, Vinka H P

**HRD & KESEKRETARIATAN** Nuryana

**SIRKULASI** Widhi Maulana, Bayu Aji,

N. Subihantoro

**MARKETING OFFICER** Dedy Kusnaedi, Rhiza Adittya

**ALAMAT REDAKSI**

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810  
 Telp. 021 83794508 (Hunting)  
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com  
 iklan@aktual.com

**aktual.com**  
 TERHANGAT TERPERCAYA

**aktual**  
 MEDIA



## Freeport bikin Repot

Pembaca yang budiman,

Edisi kali ini ada yang berbeda dengan edisi sebelumnya. Kali ini, hampir sebagian besar tulisan fokus ke soal Kontrak Karya Freeport.

Kondisi gonjang-ganjing dan kegaduhan politik dalam 2 bulan terakhir ini ternyata sebagian besar disumbang oleh pro dan kontra soal kontrak karya Freeport. Tensi politik soal Freeport akhirnya meledak setelah Menteri Sudirman Said menyerahkan transkrip percakapan Setya Novanto dengan pihak Freeport ke MKD. Terjadilah kegaduhan. Sudirman Said dan Setya Novanto mengklaim mereka lah yang benar. Namun, esensi persoalan yakni kontrak karya Freeport justru hilang dari peperangan antarkubu Sudirman Said dan setya Novanto.

Aktual ingin mendudukan masalah kontrak karya Freeport sebagai inti masalah. Bukan soal Sudirman Said versus Setya Novanto. Ini momentum paling

bagus untuk mengembalikan Freeport ke negara yang hampir selama 48 tahun negara ini tidak pernah punya *bergainig power* untuk mengambil alih Freeport. Maklum, terlalu banyak kepentingan dibalik kontrak karya Freeport.

Laporan utama kali ini, Aktual mencoba menampilkan sebuah racikan tulisan bahwa Nasionalisasi Freeport sudah harus menjadi keharusan sebagai bentuk kedualtan ekonomi dan politik negara bangsa ini.

Aktual juga menampilkan soal pentingnya kasus ISIS. Islam Indonesia bukan Islam ISIS atau Islam yang pro ISIS. Islam Indonesia adalah islam yang terus mengembangkan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Bukan Islam yang bersahabat dengan bom, senjata dan perang.

Pembaca juga bisa menikmati beberapa tulisan menarik yang disajikan di edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat...

Selamat membaca

Redaksi ◦

## Laporan Utama

### 32 Freeport Bikin Repot

Kontrak pertambangan dengan Freeport itu juga yang pertama kali menandai kontrak yang menguntungkan perusahaan asing.



### 36 Cukup Sudah Penjajahan Ekonomi Amerika Serikat di Papua

Freeport bukan sekadar hitung-hitungan investasi ekonomi, melainkan merupakan mata-rantai investasi politik dan simbol penjajahan ekonomi Amerika Serikat di Papua. Beranikah Presiden Jokowi ambil sikap tegas hentikan kontrak karya sekaligus menasionalisasi Freeport?



### 40 Freeport, Nasionalisme, dan Nasionalisasi

Diskusi tentang masa depan PT Freeport Indonesia hampir selalu dikaitkan dengan nasionalisme, yang berujung pada keinginan untuk menasionalisasi perusahaan tambang tersebut. Tetapi kalangan internal istana tidak satu suara soal gagasan nasionalisasi itu.



## 26 OPINI

### Membangun Indonesia dari Pinggiran

Oleh: Olly Dondokambey



Membangun Indonesia, bukan mulai dari kota, tetapi mulai dari daerah, desa dan pinggiran. Daerah adalah lokus pertanian, tambang, keluatan. Tanpa membangun daerah pinggiran, kita akan terus dicap sebagai negara gagal.

## 42 OPINI

### Nasionalisasi Freeport

Oleh: Salamuddin Daeng



Perusahaan tambang Freeport adalah penyakit kanker bagi kedaulatan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya merusak mentalitas pejabat Indonesia yang selalu bersedia menjadi kacung Freeport, namun lebih jauh Freeport tampaknya menolak taat kepada peraturan perundangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 12 AKTUAL REVIEW

### Teror di Paris dan Perang yang Lebih Luas

Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan hari Jumat, aliansi pertahanan itu akan mendukung Perancis dan tetap "kuat dan bersatu" melawan terorisme.

## 16 NASIONAL

### "Titanic" Di Teluk Lamong

Pasca kejadian itu, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak, Surabaya, mulai mendata korban. Namun data penumpang dan data pemilik kapal berbeda.

## 20 POLITIK

### Memperpanjang Nafas Freeport, Mengusur Nawacita

Menteri ESDM Sudirman Said mempunyai niat terselubung dengan menjebak Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

## 46 HUKUM

### Langgar Hukum, Mengapa Freeport Dipertahankan?

Sudirman Said juga diduga melegalkan perbuatan melanggar UU Minerba yang dilakukan PT Freeport soal pembangunan hasil pengolahan tambang (smelter), dengan meneruskan Permen ESDM No 1 tahun 2014.

## 50 EKONOMI

### Skandal Freeport Indonesia, Penyebab Saham Freeport McMoRan Anjlok

Penurunan saham Freeport McMoRan dalam sebulan ini disebabkan skandal yang tengah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, sehingga pasar merespon negatif.

## 51 EKONOMI

### Wow, Ambil Alih Tambang Freeport Kurs Rupiah Bisa Rp2.000/USD?

Rizal menegaskan, jika Indonesia mengambil alih Freeport maka sama dengan mendapatkan 'durian runtuh'. Bahkan bisa menyulap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini menjadi Rp2.000/USD.

## 54 INTERNASIONAL

### Menangkal ISIS Pasca Teror Paris

Lewat aksi terornya, ISIS telah merusak nama Islam dan memojokkan kaum Muslim, yang jadi sasaran kebencian dan kecurigaan di seluruh dunia. Langkah menangkal pengaruh ISIS harus lebih serius.

## 56 LIFE

### Tambang Emas Terbesar di Dunia

Berikut adalah daftar sepuluh tambang terbesar di dunia, tambang bawah tanah (underground mining) yang beroperasi di beberapa negara (dalam hal ini bersumber bijih, berdasarkan data tahun 2014-2015).

3	Tatap Redaksi	10	Lensa Aktual	48	Kilas Hukum
5	Terkini	18	Kilas Peristiwa	52	Kilas Ekonomi
8	Kaki Hari	24	Kilas Politik	54	Oase

## Perusahaan Arifin Panigoro Akuisisi 76% Saham Newmont

PT Medco Energi Internasional Tbk akan mengambil 76 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara di Lapangan Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Presiden Direktur Medco Energi Internasional Tbk Arifin Panigoro mendatangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (25/11), guna melaporkan rencana tersebut.

“Intinya, karena Menko Rizal Ramli membawahi pertambangan, saya lapor. Kami niat dari jauh melakukan pembicaraan dengan penjual yaitu Newmont, bahwa kami segera masuk,” katanya.

Arifin menjelaskan nilai transaksi saham itu mencapai sekitar 2,2 miliar dolar AS.

Ia menambahkan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan PTNNT terkait pengambilalihan saham dan berharap transaksi bisa dilakukan akhir 2015.

“Kami sudah tanda tangan, makanya buru-buru saya lapor kepada beliau (Rizal) karena kita butuh sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Menurut dia, Lapangan Batu Hijau memang telah melewati puncak produksi dan hanya tersisa sekitar lima hingga enam tahun lagi.

Namun, di sebelah Lapangan Batu Hijau terdapat lapangan baru yang punya potensi besar untuk dikembangkan.

“Maka kami susun rencana, begitu yang satu (produksinya) turun, gunung yang sebelahnya akan dimulai (penambangannya),” katanya.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyambut positif kedatangan Arifin Panigoro guna meminta dukungan atas rencana pengambilalihan 76 persen saham di ladang emas dan tambaga tersebut.

“Pak Arifin datang minta dukungan untuk ambil alih 76 persen saham Newmont. Ini inisiatif yang bagus sekali karena menunjukkan bahwa kekuatan

nasional kita apakah itu pemerintah, BUMN atau swasta seperti Pak Arifin ternyata bisa mampu mengelola tambang besar seperti Newmont di NTB,” katanya.

Komitmen itu juga didukung Rizal sebagai bukti kekuatan perusahaan nasional dalam mengelola tambang besar, yang selama ini didungungkan tidak bisa dilakukan oleh Indonesia.

“Saya minta Pak Arifin jangan kecewakan kita. Kita harus buktikan kita juga mampu mengelola tambang besar. Kita ini bangsa pemenang bukan bangsa yang kalah melulu,” pungkask Rizal. *Arbie Marwan-Ant*

### Menko Luhut Dukung Tutup Tambang Emas Gunung Botak

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan mendukung tindakan Pemerintah Provinsi Maluku menutup aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Pulau Buru.

“Penambangan liar memang harus dihentikan dan ditutup. Syukur saya mendengar dari Gubernur Maluku Said Assagaff bahwa Gunung Botak juga sudah ditutup,” kata Menko Luhut disela-sela Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Maluku (MAMA), di Ambon, Kamis (26/11).

Luhut mengingatkan Pemprov Maluku jika areal pertambangan emas Gunung Botak akan dikelola, hendaknya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta tidak menggunakan bahan berbahaya terutama merkuri dan sianida.

“Saya terkejut mendengar penjelasan Gubernur Said bahwa ternyata yang memasok dan menggunakan merkuri serta sianida para areal pertambangan di Gunung Botak ternyata para penambang dari luar Maluku,” ujarnya.

Penggunaan merkuri dan sianida tidak hanya merusak lingkungan sekitar atau tumbuhan mati, tetapi

lebih dari yang terkena dampak paling berbahaya adalah generasi penerus bangsa di Maluku di masa mendatang.

Dia menegaskan, area pertambangan yang dilakukan secara ilegal di berbagai daerah di tanah air harus segera ditutup.

“Jika dibiarkan terus berlangsung maka dikhawatirkan dalam kurun 10 tahun mendatang ada satu generasi yang hilang atau lahir dengan kondisi keterbelakangan mental atau bodoh,” tegasnya.

Dia menambahkan, langkah tegas penutupan lokasi penambangan ilegal di berbagai daerah dengan melibatkan TNI dan Polri, merupakan salah satu solusi untuk mencegah berulangnya kasus Minamata di Jepang tahun 1953, atau di Teluk Buyat di Sulawesi Utara.

“Karena itu saya mengimbau pemprov serta aparat keamanan untuk bertindak tegas menutup semua kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah di tanah air, sehingga tidak terulang lagi berbagai kasus pencemaran lingkungan maupun penyakit,” tandasnya.

Kegiatan penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru dimulai sejak tahun 2011, di mana pada periode 2012-2013 tercatat sebanyak lebih dari 30 ribu penambang yang datang dari berbagai daerah melakukan aktivitas penambangan di lokasi seluas 250 hektar tersebut.

Aktivitas penambangan yang dilakukan dengan menggunakan merkuri dan sianida secara berlebihan menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) Anahoni yang bermuara di Teluk Kaiely mengalami kerusakan sangat parah.

Aliran air pada DAS tersebut menjadi kering serga ribuan tanaman sagu mati, selain itu, terdapat ratusan kolam rendaman yang mengandung bahan beracun dan logam berat akibat penggunaan merkuri dan sianida secara berlebihan, dibiarkan begitu saja oleh para penambang.

*Arbie Marwan-Ant*



Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap dolar AS lebih tinggi, secara alamiah dolar AS akan menguat. Kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya, tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Kondisi ekonomi global saat ini juga memberi pengaruh. Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Di sisi lain, tahun 2005, utang luar negeri atau korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015,

jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR), juga meningkat dari sekitar 15 persen di tahun 2007 menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan, antara lain, upaya pendalaman pasar keuangan, agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga melakukan monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri yang mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan peringkat utang.

#### **Simbol kedaulatan**

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

# KEDAULATAN RUPIAH MEMPERSATUKAN 34 PROVINSI DI INDONESIA



Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia jumlahnya cukup tinggi. Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp936 triliun per tahun.

Tingginya transaksi dalam dolar tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur hingga perdagangan.

Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai bentuk 'ancaman' atau *soft invasion* terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu Negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya akan memperlemah perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpastian. Kita juga pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, masyarakat perlu mendukung penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, dan selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit ekspor-impor barang dan jasa, tidak dapat ditawar lagi.

Namun, di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga mutlak perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.





# Sekali lagi, Pancasila!

**S**ebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu.

Adapun warisan termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika bom secara teatrikal dibingkiskan ke sejumlah alamat dengan mempermainkan nyawa manusia, kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan.

Bung Karno berkata, “Aku, ya Tuhan, telah Engkau beri kesempatan melihat penderitaan-penderitaan rakyat untuk mendatangkan negara Indonesia yang merdeka itu. Aku melihat pemimpin-pemimpin, ribuan, puluhan ribu, meringkuk di dalam penjara. Aku melihat rakyat menderita. Aku melihat orang-orang mengorbankan ia punya harta benda untuk tercapainya cita-cita ini. Aku melihat orang-orang didrel mati. Aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku pernah menerima surat daripada seorang Indonesia yang keesokan harinya akan naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia mengamanatkan kepada saya sebagai berikut: „Bung Karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini. Lanjutkanlah perjuangan kita ini?.”

Empati terhadap sejarah pengorbanan itulah yang membuat para pendiri bangsa memiliki jiwa kepahlawanan. Kenanglah heroisme para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat berpidato dengan menyerukan

kemerdekaan dengan dasar negara yang diidealisasikan di tengah opsir-opsir bala tentara Jepang bersenjatakan bayonet.

Bung Karno mengakui, “Saya sadar, Saudara-saudara, bahwa ucapan yang hendak saya ucapkan mungkin adalah satu ucapan yang berbahaya bagi diriku, sebab ini adalah zaman perang, kita pada waktu itu di bawah kekuasaan imperialis Jepang, tetapi juga pada waktu itu, Saudara-saudara, aku sadar akan kewajiban seorang pemimpin. Kerjakanlah tugasmu, kerjakanlah kewajibanmu, tanpa menghitung-hitung akan akibatnya.”

Kali ini kita mengalami kemerosotan begitu dalam dari jiwa pertanggungjawaban. Kenanglah rasa tanggung jawab para pendiri bangsa!

Dalam membicarakan hukum dasar, Mohammad Yamin mengingatkan, “Saya hanya minta perhatian betul-betul karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada *grondwet; grondwettelijke fout*, kesalahan perumusan Undang-Undang Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti- nantikan hak dari pada republik.”

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih dari sekadar *politics as usual*. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa.

Usaha “penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan



pandangan bangsa Indonesia. Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan pandangan dunianya tersendiri.

Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini kemampuan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar).

“Kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke

hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya.”

Akibat keteledoran,

ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, terutama oleh penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pimpinan itu pun redup tertutup kabut; menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan.

Lantas anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar “rumah”. Seseorang bertanya, “Apa gerangan yang kalian cari?” Anak-anak negeri itu pun menjawab, “kunci rumah”. “Memangnya di mana hilangnya kunci itu?” “Di dalam rumah kami sendiri”. “Mengapa kalian cari di luar rumahmu?” “Karena rumah kami gelap”.

Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu.

Marilah kembali ke Pancasila! ◦



**LENSA AKTUAL**

## Mega Bertemu Setya Novanto

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) usai menonton Pagelaran Peduli Bangun Majapahit di Teater Besar TIM, Jakarta, Kamis (26/11).

Pagelaran tersebut bercerita tentang berdirinya kerajaan Majapahit dengan dibumbui humor dan kritik kondisi politik Indonesia.

Antara Foto - Rosa Panggabean



# Teror di Paris dan Perang yang Lebih Luas



**S**erangan teror di Paris, Perancis, tidak akan berhenti dampaknya hanya di negeri Eropa yang jadi pusat mode tersebut. Ada muncul laporan-laporan hari Senin (16/11) bahwa Perancis akan menyerukan penerapan Ayat 5 Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty) NATO. Pasal pertahanan kolektif NATO itu mewajibkan seluruh anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, untuk berperang bersama Perancis melawan musuh: ISIS.

Dalam menanggapi serangan terkoordinasi hari Jumat (13/11) yang menewaskan sekitar 129 orang di kota Paris, Presiden Perancis Francois Hollande mengumumkan hari Sabtu (14/11), pihaknya akan menanggapi dengan perang “tanpa ampun” terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu. Berbicara dari Bataclan, tempat terjadinya salah satu serangan, ia menyatakan: “Kita akan memimpin perang yang akan bersifat tanpa ampun.”

Pada hari Minggu (15/11), tampaknya sebagai “pembalasan terhadap aksi teror,” 10 pesawat jet tempur Perancis menghajar kota Raqqa, Suriah, yang dikuasai ISIS. Setidaknya 20 bom dijatuhkan di kota itu, kata Kementerian Pertahanan Perancis. Jet-jet itu menghantam

sebuah pusat komando dan kontrol, pusat rekrutmen jihad, depot amunisi, dan sebuah kamp pelatihan.

Dalam sebuah pernyataan berbahasa Arab dan Perancis di media online, yang oleh otoritas keamanan dianggap asli, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan di Paris. Serangan-serangan teror itu disebut sebagai “keajaiban” yang dilakukan oleh “delapan saudara yang mengenakan rompi bahan peledak dan senapan serbu.” Paris yang jadi sasaran serangan disebut sebagai “ibukota kemesuman dan penyimpangan.”

Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan hari Jumat, aliansi pertahanan itu akan mendukung Perancis dan tetap “kuat dan bersatu” melawan terorisme. Walau Perancis belum mengumumkan apakah pihaknya akan menyerukan pemberlakuan Ayat 5, Stoltenberg memberitahu bahwa para anggota NATO bersiap siaga untuk membantu. “Hal yang penting adalah kami mendukung otoritas Perancis dalam tekad mereka untuk menghadapi ancaman teroris,” ujarnya.

Pasal perjanjian NATO itu menyatakan, jika diminta maka setiap anggota akan wajib membantu negara anggota yang diserang. Sumber militer NATO, yang bisa dioperasikan untuk perang termasuk lebih dari

3.000.000 tentara, 25.000 pesawat tempur, dan 800 kapal perang yang mampu mengarungi lautan. Secara ekonomi, aliansi pertahanan ini juga memiliki kekuatan yang cukup menggentarkan, karena mereka mewakili lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto global.

Pertama kalinya Ayat 5 diserukan adalah sesudah 11 September 2001, saat serangan-serangan teror terhadap gedung kembar World Trade Center di New York dan Washington, yang memicu partisipasi NATO dalam misi militer di Afghanistan. Seandainya Perancis menjadi negara kedua yang akan melakukan hal itu, para duta besar dari 28 negara anggota NATO perlu bertemu untuk berkonsultasi, untuk menentukan rencana aksi. Negara terakhir yang pernah meminta konsultasi itu adalah Turki, sesudah serangan-serangan oleh ISIS pada 2014.

Jika Perancis menyerukan Ayat 5, pada esensinya Perancis telah mendeklarasikan perang, bukan sekadar otorisasi bagi penggunaan kekuatan militer. Bagaimanapun, situasi ini menjadi rumit disebabkan fakta bahwa ISIS berbasis di Suriah, yang sedang dilanda perang saudara. Bukan cuma ISIS yang berada di sana, tetapi juga pasukan militer Suriah yang setia pada Presiden Bashar as-Asad. Pasukan ini berperang melawan ISIS dan melawan pasukan oposisi yang ingin menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad.

Namun, militer Rusia saat ini sedang berada di Suriah, untuk membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ketika NATO ingin menyerang ISIS, pasukan NATO harus pergi ke Suriah di mana militer Rusia sudah hadir. Apakah Rusia akan bersikap lemah, mengalah, dan membiarkan NATO menyerang? Atau apakah Rusia akan memutuskan bahwa tindakan NATO ini hanyalah usaha yang disamakan untuk menggulingkan Bashar al-Assad, dan menyebabkan Rusia harus berperang melawan NATO? Banyak dampak lanjutan dari aksi teror di Paris yang belum terbayangkan. ● Satrio Arismunandar

memberi anda  
**perspektif**  
yang berbeda ...



**aktual.com**  
TERHANGAT TERPERCAYA

**AKTUAL**  
MAGAZINE

**aktual** 1000000

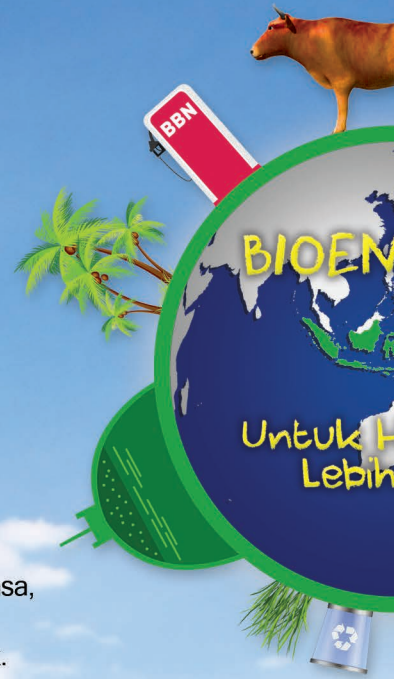
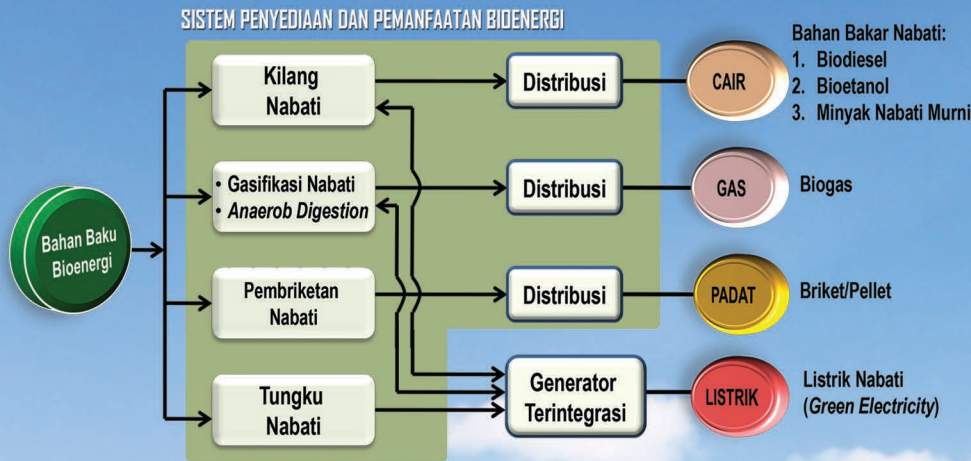
Info Dan Pemasaran :

☎ **081517933376** (Dedy)    **081280941009** (Rhiza)

✉ **iklan@aktual.com** | **marketing@aktual.com** | **sirkulasi@aktual.com**

🌐 **www.aktual.com**

# PROGRAM PENGEMBANGAN BIOENERGI



- Bioenergi adalah energi terbarukan yang diperoleh dari sumber biologis seperti biomasa, limbah, sampah organik dan lainnya.
- Penyediaan bioenergi sebagai energi final dapat berbentuk cair, gas, padat dan listrik.
- Bioenergi dalam bentuk cair yang sering di sebut sebagai dengan **Bahan Bakar Nabati (BBN)** terdiri dari biodiesel, Bioetanol, Minyak Nabati Murni (*Pure Plant Oil/PPO*), bioavtur dan lainnya, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti BBM.
- Bioenergi dalam bentuk gas dikenal dengan **Biogas**, dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor, lampu penerangan maupun pembangkit listrik.
- Bioenergi dalam bentuk padat, dapat berupa **briket, pellet, atau wood chip**.
- Bioenergi juga dapat dikonversi menjadi **listrik** dengan memanfaatkan bahan bakar dari BBN, biogas, maupun gasifikasi biomassa.



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI**  
**BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

# MANFAAT PENGEMBANGAN BIOENERGI



## KETAHANAN ENERGI

Ketersediaan bahan baku terus menerus / energi terbarukan

Diversifikasi sumber energi

Mengurangi penggunaan energi fosil

Mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak

Menjaga ketahanan cadangan energi nasional

## DAMPAK EKONOMI

Penciptaan industri lokal

Pengembangan sektor industri hilir pertanian

Positifitas neraca perdagangan karena mengurangi impor BBM

Peningkatan nilai tambah produk

Meningkatkan investasi dalam negeri

Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha

## DAMPAK LINGKUNGAN

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)

Pengurangan tingkat polusi udara non-GRK

Meningkatkan sanitasi lingkungan karena dapat diproduksi dari limbah

Mudah terurai secara alami (biodegradable)

Meningkatkan kualitas udara dan meningkatkan kesehatan umum serta kesejahteraan masyarakat



## DIREKTORAT BIOENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng Jakarta Pusat 10320

☎ 021-39830077 ☎ 021-31901087 ✉ info@ebtke.esdm.go.id

[www.ebtke.esdm.go.id](http://www.ebtke.esdm.go.id)



## “Titanic” Di Teluk Lamong

**S**eperti biasa, rutinitas. Tanpa ada firasat, KM Wihan Sejahtera melakukan pelayaran dari Dermaga Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Labuan Bajo, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (16/11).

Berangkat pukul 09.00 WIB dari dermaga itu. Namun sekitar pukul 09.45 terdengar suara “bruakkkk...” sepertinya benturan keras terjadi di lambung kapal KM Wihan Sejahtera.

Sekitar 200-an penumpang kapal itu baru sadar bahwa benturan itu menyebabkan kapal itu mulai miring ke kiri. Penumpang baru sadar juga bahwa terjadi kebocoran di lambung kiri kapal nahas itu yang membuat posisi kapal miring.

Kapal jenis *roll on-roll off* (roro) itu perlahan mulai tenggelam.

Kepanikan terjadi. Jerit dan ketakutan memecah. Mereka berebut pelampung yang ada di kapal. Namun, jumlah pelampung yang ada ternyata kurang dari jumlah penumpang yang ada.

Beberapa penumpang nekat meloncat ke laut. Ada yang bergelantungan di lambung kapal untuk turun ke laut. Mungkin mereka berharap agar mereka segera dapat pertolongan dari nelayan atau Ditpolair Polda Jatim yang berpatroli. “Kami merasakan ada benturan yang mengenai kapal,” ucap Bakri, salah satu penumpang yang selamat.

Kesunyian di perairan Teluk Lamong, Romo Kalisari, Surabaya itupun pecah dengan riuh panik proses evakuasi. Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan cepat

menurunkan tim untuk menolong evakuasi dan mendata korban. Beberapa petugas berperahu motor dan tim SAR juga mencari korban yang diduga tenggelam.

### Jumlah Manifes Penumpang Berbeda

Pasca kejadian itu, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, mulai mendata korban. Namun data penumpang dan data pemilik kapal berbeda.

“Kami masih mencari kepastian jumlah penumpang. Total baru 140 penumpang yang dievakuasi dan

*(Foto atas) Penumpang bergelantungan di dinding kapal untuk menyelamatkan diri saat kapal KM Wihan Sejahtera tenggelam di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/11).*

*(Foto kanan) Petugas mencatat daftar penumpang yang menjadi korban KM Wihan Sejahtera tujuan Pelabuhan Bajo, NTT, yang tenggelam di Teluk Lamong di Rumah Sakit PHC Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/11).*

informasi jumlah masih simpang siur, ada yang mengatakan 15 penumpang, namun ada yang mengatakan 178 penumpang," kata Kepala KSOP Tanjung Perak, Surabaya, Rudiana, Senin (16/11).

Menurut Rudiana, memang kapal Wihan Sejahtera sebenarnya bisa mengangkut sekitar 500 orang. Namun, masalahnya adalah perbedaan manifest. Dari pemeriksaan sementara, penumpang bertambah karena banyak sopir truk yang membawa kernet tanpa membeli tiket.

Kepala Humas Pelabuhan Teluk Lamong, Reka Yusmara Mardiputra mengatakan sebanyak 140 korban telah dievakuasi melalui pelabuhan setempat, dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit "Porth Health Centre" (PHC) dan Gapura Surya Nusantara (GSN) untuk mendapatkan penanganan dan perawatan.

Ini jadi masalah klasik, dan terus berulang ketika sebuah kapal mengalami kecelakaan.

Tak lama setelah peristiwa nahas itu, empat belas anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Mereka mempertanyakan kejelasan terkait tenggelamnya Kapal Motor (KM) Wihan Sejahtera. Ditemui langsung oleh nahkoda kapal, Syahbandar, Pelindo dan perwakilan manajemen pelayaran KMP Wihan Sejahtera, mereka bertanya soal perbedaan manifest ke manajemen pemilik kapal Wihan Sejahtera.

"Kenapa manifest berbeda-beda.

Padahal kan harus sesuai. Kalau sudah terjadi kecelakaan seperti ini, siapa yang bingung. Apakah sekarang ini sudah pasti tidak ada korban? Kan belum pasti. Manifest tidak sesuai apa yang bisa menjadi patokan," kata anggota komisi V F-PDIP Sadarestu, Rabu (18/11).

Hal senada dikatakan anggota lain, Anton Sihombing. "Wihan ini setahu saya sudah sering insiden sejak 2014 lalu. Banyak kesalahan. Saya meminta ijin oprasional dicabut," terangnya.

Menurut Anton, ada banyak kesalahan yang dilakukan. Seperti memakai nahkoda yang baru 9 bulan berlayar, manifest yang berbeda sampai asuransi pemilik barang yang tidak dibayarkan manajemen pemilik kapal kepada asuransi PT Jasa Raharja Putra. "Sudah terjadi insiden, kenapa pimpinan manajemen sekarang tidak hadir. Ini membuktikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab," kata Anton.

Bukan hanya mengancam pemilik kapal, anggota Komisi V DPR RI tersebut juga mempertanyakan kinerja Syahbandar kelas utama Tanjung Perak. Mereka menganggap kerja Syahbandar tidak optimal.

### KM Wihan Berangkat Tak Sesuai SOP Pelayaran

Saat dikonfirmasi, Kepala Tata Usaha Syahbandar Tanjung Perak, Marzuki, mengatakan sebenarnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal Wihan Sejahtera sudah dikatakan layak.

Namun di lapangan, tidak mudah untuk melakukan pengecekan kapal satu persatu. Sebab, selama ini ketika mengeluarkan SPB, petugas syahbandar selalu mengalami kendala masalah waktu. "Mengeluarkan surat persetujuan itu juga dilakukan pengecekan kapal secara bersamaan. Tetapi waktunya sangat lama karena jadwal tidak *on time*," kata Marzuki.

Terlambatnya jadwal penumpang masuk, kemudian jadwal keberangkatan kapal yang 'molor' berpengaruh terhadap efisiensi pekerja syahbandar dalam pengecekan. "Karena molornya dan mengawasi penumpang satu persatu dan barang bawaannya, kita harus menunggu sampai lebih dari 12 jam. Itu waktu yang melelahkan. Dan tentu saja berpengaruh terhadap kinerja," lanjutnya.

Menurut Marzuki, Syahbandar bukan berarti tidak bekerja optimal. Petugas syahbandar bahkan selalu melakukan pengecekan sampai kapal akan berangkat.

Namun, menurut pengakuan Stefanus, seorang sopir truk, perlakuan terhadap muatan barang yang masuk di kapal Wihan ternyata berbeda dengan kapal lain. Truknya tidak diikat oleh ABK kapal Wihan. "Kalau tidak diikat kan bahaya. Kalau kapal goyang terkena ombak, maka muatan akan bergerak dan bisa saja terguling," katanya beberapa saat lalu.

Apalagi, kata Stefanus, lantai kapal Wihan licin. "Lantainya juga licin. Waktu saya tanya ke ABK, ternyata lantainya dibersihkan atau dipel pakai solar. Nah kalau muatan tidak diikat, ditambah lantai yang licin, tamatlah sudah kalau ada guncangan," tambahanya.

Meski kecelakaan kapal terjadi sudah seminggu lalu, sampai detik ini para sopir juga belum mendapat ganti rugi akibat angkutan truknya hilang atau rusak.

"Kita sudah bayar asuransi, sudah bayar Pelindo, bayar Polisi. Tapi setelah kecelakaan kok kita tidak ada konfirmasi sama sekali," tutupnya. ◦

Ahmad Haris Budliawan



## Diserang Penyakit Misterius, 41 Balita dan 15 Orang Dewasa Meninggal Dunia

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa dari laporan sementara yang diterima terungkap dalam kurun waktu dua bulan terakhir tercatat 41 bayi di bawah lima tahun (balita) dan 15 orang dewasa di Kabupaten Nduga meninggal dunia.

Jenderal bintang dua asli Papua itu mengakui dari laporan sementara yang diterima terungkap warga dan balita itu meninggal akibat terserang pneumonia.

“Namun untuk kepastiannya, pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari yang dipimpin oleh Kapolres Jayawijaya itu,” kata Paulus Waterpauw, Kamis (26/11).

Sementara itu perjalanan untuk mencapai Kabupaten Nduga dapat ditempuh sekitar lima jam perjalanan melalui darat dari Wamena.

Adapun daerah yang mengalami musibah meninggalnya balita dan dewasa itu, antara lain di Distrik Mbuwa dan Distrik Bumul Liama.

/Sukardjito-Ant



Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) dan Raja Yordania Abdullah bertemu di Istana Kepresidenan Bocharov Ruchei di Sochi, Rusia, Selasa (24/11). Sebelum pertemuan dengan Raja Yordania, Putin menyebut Turki yang menjatuhkan pesawat tempur Rusia sebagai “sebuah tusukan dari belakang” yang dilakukan oleh kaki tangan teroris, mengatakan insiden tersebut akan mengakibatkan konsekuensi serius untuk hubungan Moskow dengan Ankara.

## Tembak Pesawat Rusia Putin Tudung Turki Dukung Teroris

Presiden Rusia Vladimir Putin berang dengan tindakan Turki yang menembak jatuh jet Rusia SU-24, Selasa (24/11). Putin menyebut negara yang dipimpin oleh presiden Recep Tayyip Erdoğan mendukung gerakan teroris.

“Insiden ini menentang perlawanan terhadap terorisme. Pasukan kami bertempur habis-habisan melawan teroris dan bertaruh nyawa,” kata Putin.

Putin bahkan menyebut Turki telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan penembakan tersebut.

“Namun, kerugian yang kami derita hari ini sebagai akibat tusukan dari belakang oleh kaki tangan teroris (Turki),” lanjut Putin.

Putin membantah keterangan militer Turki yang menyebutkan pesawatnya telah melanggar batas udara kedaulatan Turki. Menurutnya jet milik Rusia berada satu kilometer dari batas wilayah Turki diketinggian 6.000 meter.

Putin berdalih jet tempur Rusia saat itu tengah melakukan misi menghancurkan kekuatan ISIS di Provinsi Latakia, Suriah. Kebanyakan teroris tersebut berasal dari Rusia.

Rusia menyebut sudah lama mengetahui perdagangan minyak ilegal dari Suriah menuju Turki dengan diawasi teroris. Uang hasil penjualan minyak itu dipakai untuk membiayai aksi kelompok teroris.

“ISIS memiliki uang banyak, ratusan juta atau bahkan triliunan dollar dari hasil penjualan minyak,” kata Putin.

Selain itu, menurut Putin, kelompok ISIS juga dilindungi oleh militer dari seluruh bangsa.

“Maka dari itu, bisa dipahami mengapa mereka (ISIS) bisa bertindak berani dan terang-terangan, mengapa mereka membunuh orang-orang dengan cara mengerikan, mengapa mereka melakukan aksi teror di seluruh dunia, termasuk di jantung Eropa,” kata pemimpin Rusia itu. /Wahyu Romadhoni

## Selama November, Kebakaran Jadi Bencana Tertinggi di Jakarta



Selama November 2015, bencana kebakaran tercatat yang tertinggi terjadi DKI Jakarta. Di laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, tercatat ada 45 kasus kebakaran. Dengan jumlah korban mencapai empat orang dan pengungsi 56 orang.

Bencana akibat cuaca ekstrem menempati urutan kedua. Mencapai 33 kejadian. Disusul posisi tiga bencana banjir dengan empat kejadian.

Untuk total sepanjang tahun 2015 hingga November, jumlah kebakaran di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu mencapai 744 kejadian. Menyusul cuaca ekstrem 213 kejadian, banjir 38 kejadian, kegagalan teknologi satu kejadian dan konflik sosial 2 kejadian.

Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah paling banyak terjadi kebakaran dengan 191 kejadian. Disusul Jakarta Barat 154 kejadian, Jakarta Selatan 147 kejadian, Jakarta Utara 122 kejadian, Jakarta Pusat 109 kejadian dan Kepulauan Seribu 1 kejadian.

Untuk bencana banjir, paling tinggi kejadian ada di Jakarta Utara dengan 18 kejadian, Jakarta Timur 9 kejadian, Jakarta Barat 8 kejadian, Jakarta Selatan 6 kejadian, dan Jakarta Pusat 3 kejadian.

Untuk bencana cuaca ekstrem, Jakarta Selatan menempati urutan pertama dengan 72 kejadian. Disusul Jakarta Timur 53 kejadian, Jakarta Pusat 33 kejadian, Jakarta Barat 29 kejadian, dan Jakarta utara 20 kejadian. /M Vidia Wirawan

## Gempa Halmahera Sebabkan 9.610 jiwa Mengungsi

Gempa terus menerus yang mengguncang Kab Halmahera Barat Prov Maluku Utara (Malut) sejak 16 November 2015 hingga Rabu (25/11) masih dirasakan dan masih terdapat 9.610 jiwa mengungsi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengungkapkan 9.610 jiwa mengungsi yang tersebar di 19 desa di Kecamatan Jailolo Kab Halmahera Barat.

“Total terjadi 611 kali gempa sejak 16-23 November 2015,” katanya, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (26/11).

Ia mengatakan saat siang hari pengungsi berkurang karena bekerja melakukan aktivitasnya.

Dikatakan dampak gempa menyebabkan 934 rumah rusak yaitu 237 rusak berat, 193 rusak sedang dan 504 rusak ringan. Tercatat 11 gedung fasilitas umum juga rusak. Ada retakan sepanjang 500 meter di Ds. Galala.

Penanganan darurat masih dilakukan dan Bupati Halmahera Barat telah menetapkan SK Tanggap Darurat selama 14 hari (21-11-2015 hingga 6-12-2015) dengan mengerahkan sebanyak 75 personil

dari tim gabungan.

Gubernur Malut melalui BPBD Prov Malut telah memberikan bantuan 400 dus mie instan dan 400 dos air minum kemasan. Logistik di BPBD Halmahera Barat didistribusikan ke pos pengungsian.

Ia mengatakan semua bantuan dikoordinir BPBD Halmahera Barat. Telah dibentuknya Tim verifikasi kerusakan rumah yang beranggotakan Tim BNPB, BPBD Kabupaten, Dinas PU, TNI/Polri, aparat desa.

“Hingga saat ini masih beredar informasi yang menyesatkan bahwa akan ada gempa besar susulan dan tsunami sehingga masyarakat resah. Beberapa warga menyelamatkan diri ke hutan akibat ada isu tersebut,” katanya.

Pihaknya mengimbau masyarakat waspada dan tidak perlu panik karena tipe gempa di Halmahera Barat adalah tipe Swarm, yaitu gempa dengan magnitudo kecil yang berlangsung terus menerus tanpa ada gempa besar.

Adanya gempa-gempa kecil (di bawah 5 SR) dengan kedalaman dangkal menyebabkan guncangan keras tetapi lokal dan kecil kemungkinan terjadi gempa yang besar untuk saat ini. /Sukardjito-Ant





# Memperpanjang Nafas Freeport, Menggusur Nawacita

**M**enteri ESDM Sudirman Said mempunyai niat terselubung dengan menjebak Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Bagaimana mungkin, menteri sekelas Sudirman Said sampai tidak memahami isi Kontrak Karya PTFI dan isi aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Kelompok Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan geram bukan kepalang dengan langkah Sudirman Said. Dibeberkan bagaimana Menteri

ESDM melalui surat Nomor 7522/13/ MEM/2015 pada 7 Oktober 2015 membalas surat permohonan perpanjangan kontrak dari Freeport.

“Ini nyata-nyata memperlihatkan niat terselubung yang hendak menjebak pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Kapoksi VII F-PDIP Yulian Gunhar di Gedung DPR Senayan, akhir bulan Oktober lalu.

Dalam jumpa pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan itu Yulian tidak sendirian. Beberapa anggotanya di Poksi VII turut mendampingi. Diantaranya Tony Wardoyo, Dony Maryadi Oekon, Mercy Christy

B, Falah Amru, Iwan Andi Ridwan Wattiri dan Adian Napitupulu.

Sejak Sudirman melayangkan surat ke bos besar Freeport, McMoran Inc, James R Moffet, 7 Oktober 2015, F-PDIP tercatat menjadi fraksi paling keras mengkritik langkah Sudirman Said. Apalagi dalam surat itu disebut-sebut Menteri ESDM telah memberikan sinyal perpanjangan kegiatan operasi Freeport.

Tidak cukup sekali. Dalam sepekan, fraksi partai banteng moncong putih tercatat dua kali mempertegas sikapnya. Pertama



*Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11).*

pada Senin tanggal 19 Oktober, kedua pada Jumat tanggal 23 Oktober 2015. Tema besar yang diusung adalah 'Membongkar Niat Terselubung Dibalik Permohonan Perpanjangan Operasi PTFI'.

“Surat permohonan (Freeport) datang tanggal 7 Oktober, dijawab tanggal 7 juga. Jangankan berkoordinasi dengan Presiden, mungkin koordinasi dengan bidang hukum departemen terkait juga enggak ada. Kalau koordinasi tidak seperti ini,” tegas Adian Napitupulu.

“Pernyataan Presiden soal Freeport sangat jelas, tidak ada

Yang terhormat,  
Sdr James R. Moffet  
Chairman of the Board Freeport McMoran Inc

Terima kasih atas surat saudara tanggal 7 Oktober 2015. Sehubungan dengan surat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan kontrak karya hingga 30 Desember 2021.
2. Pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015, sebagaimana kami sampaikan melalui surat tanggapan nomor 6665/05/MEM/2015 tanggal 11 September 2015.
3. Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan, setelah diimplementasikannya penataan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dipahami bahwa persetujuan atas permohonan tersebut nantinya akan memberikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum yang sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku.
4. Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjangan kontrak PTFI, kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan. Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PTFI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar tambahan 18 miliar Dollar Amerika untuk kegiatan operasi PTFI selanjutnya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Sudirman Said

perpanjangan PT Freeport Indonesia sebelum 2019. Kita pertanyakan ESDM sampai berbeda dengan Presiden,” sambungnya.

Niat terselubung Direktur Utama PT Pindad (Persero) memperpanjang operasi Freeport terus menggelinding. Empat hari berselang, setelah F-PDIP mempermasalahkannya, giliran Komisi VII DPR RI angkat bicara.

Dipimpin ketuanya, Kardaya Warnika, Komisi VII DPR secara resmi mendesak Presiden Joko Widodo mencabut surat Menteri ESDM Sudirman Said. Sebab surat tersebut dinilai melanggar konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 4

tahun 2009 tentang Minerba dan peraturan turunan lainnya.

“Kalau itu diteruskan bisa menjebak Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi. Di mana kontrak karya itu sampai 2021. Kalau sampai 2041 jelas melanggar konstitusi. Izin usaha pertambangan tidak mengenal negosiasi. Kontrak Karya harus berakhir pada 2021,” ujarnya.

#### **Repot Karena Freeport**

Belum sepekan desakan pencabutan surat Nomor 7522/13/MEM/2015 bergulir, Sudirman Said berhasil membelokkan arah mata

angin. Melalui acara 'Satu Meja' di Kompas TV, Selasa (3/11), ia mengungkap adanya beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa dan berpengaruh yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Sudirman mempertegas tokoh dimaksud yakni Ketua DPR RI Setya Novanto. Politisi Golkar itu dituding Sudirman telah mencatut Presiden dan Wapres untuk meminta saham kosong ke Freeport dan proyek pembangkit listrik di Timika Papua.

Merujuk ucapan bos Freeport James R Moffet, dituding pula adanya menteri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan hal serupa.

"Moffett akhirnya bercerita pengalaman-pengalamannya di masa lalu tentang menteri *anu* minta apa. Ada yang meminta saham kosong meskipun tidak selalu diberi, tapi percobaan itu ada," ungkap Sudirman.

Pernyataan Sudirman 'memperpanjang' kegaduhan politik nasional pada pemerintahan baru hasil Pilpres 2014. Atas nama desakan demi desakan yang bergulir, ia akhirnya melaporkan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senin (16/11).

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut manuver Sudirman itu bagian dari manuver politik agar posisinya tidak tergusur dari perombakan kabinet Jilid II. Langkahnya juga sekaligus menempatkan dirinya seolah-olah menjadi orang bersih dan tidak menjadi bagian dari mafia di negeri ini. Dan, ia sukses menggalang simpati publik.

Setyo Novanto



"Maklumlah, saat ini Sudirman Said salah satu menteri yang berpotensi mau dipecat dari kabinet Jokowi. Sehingga bermanuver terus dengan cara berkoar-koar agar jangan sampai dipecat," ucap dia.

Sejak awal terpilih menjadi Menteri ESDM, beberapa pihak menilai lebih karena faktor atau rekomendasi Ari Soemarno. Awalnya, pihak yang mengincar kursi ESDM dan BUMN adalah Ari.

Sayangnya, Jokowi-JK lebih memilih adiknya yakni Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Melalui berbagai pertimbangan, Istana akhirnya tidak memasang kakak-adik di ESDM-BUMN. Meski gagal, Ari tetap bertekad menguasai sektor energi. Disodorkanlah murid terbaiknya, Sudirman Said, ke Jokowi.

Untuk meyakinkan Presiden, saat itu Ari disebut-sebut sampai membentuk tim khusus. Nah, belakangan Presiden dinilai telah mencium gelagat yang tidak baik dari Sudirman di Freeport. Publik santer menyoroti kinerjanya. Tidak terkecuali kritik demi kritik yang dilayangkan kader-kader banteng moncong putih pimpinan Megawati Soekanoputri.

Sudirman menggunakan langkah kuda-kuda menyikapi kritik yang dialamatkan kepadanya. Lapornya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjadi senjatanya.

Rekaman percakapan yang diduga Ketua DPR RI Setya Novanto, Presiden Direktur Freeport Ma'roef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Khalid menjadi bukti dalam laporannya.

"Kalau saya melihat, yang diungkap itu yang akan dikorbankan. Ini permainan tingkat tinggi, kalau orang biasa mana bisa. Istana itu jadi rujukan utama mereka (Freeport)," kata pengamat politik Universitas Indonesia,



Muhammad Budyatna, kepada Aktual Selasa (17/11) pekan lalu.

Keberadaan Freeport di Indonesia, menurutnya selain mengeruk sumber kekayaan terbesar di dunia juga menjadi pundi-pundi pemasukan elit-elit pejabat di negeri ini. Hal ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak era Orde Baru selama puluhan tahun dan berlanjut hingga era pemerintahan Jokowi-JK.

Ia meragukan keberanian Setya Novanto yang juga Ketua DPR RI sebagaimana disebutkan Sudirman Said, mencatut nama Presiden dan Wapres tanpa sepengetahuan kedua Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Logikanya, uang besar yang akan diterima Novanto dari perpanjangan kontrak PT Freeport tidak mungkin dimakan sendiri. Apalagi, Freeport merupakan aset terbesar di Indonesia.



Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) didampingi Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad (kanan) menyampaikan keterangan usai rapat tertutup terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Belakangan, pro kontra soal *legal standing* atau kedudukan hukum Sudirman menyeruak. Begitu halnya mengenai bukti rekaman yang diserahkan pelapor.

Ketua MKD Surahman Hidayat mengungkapkan adanya indikasi rekaman suara yang dijadikan barang bukti pencatutan Presiden dan Wapres oleh Setya Novanto diduga sudah diedit terlebih dulu sebelum diserahkan ke MKD. Hal ini karena durasi rekaman suara itu tidak sesuai dengan pernyataan Menteri ESDM sebelumnya.

“Jadi transkripnya 120 menit tapi rekaman yang diberikan hanya 11 menit 38 detik. Nah ini yang sisa 100 menitnya ke mana? Kesimpulannya kan sesat. Jadi 2 hal enggak boleh gegabah karena menyangkut masalah penting,” katanya usai rapat MKD di Gedung DPR Senayan, Senin (23/11).

“Suara rekamannya pendek sekali, jadi enggak bisa ini suaranya pendek jadi perlu teknologi *upgrade*. Menurut Pak Dasco ada bagian-bagian yang dieditkan. 100 menitnya kemana? Ini kan harus diselidiki, apa abal-abal apa gimana,” sambungnya.

Mahkamah menjadwalkan memanggil Menteri ESDM untuk meminta kelengkapan rekaman yang keseluruhan jumlahnya 120 menit.

Politisi PDIP Effendi Simbolon mengatakan permasalahan sebenarnya adalah perang ideologi antara neoliberal dengan nasionalis. Terlebih ketika Menteri Sudirman mengaku laporan atas seizin Presiden Jokowi.

“Kondisi ini contoh, sejak awal pemerintahan Jokowi, saya bertanya kok begini jadinya, ini sebenarnya ideologinya apa? Kok ideologinya kok mengusung Nawacita kenapa rasanya neolib, yang melakukan saya sebut nama Rini Soemarno, Sudirman Said, Sofyan Djalil dan orang nomor dua di Republik Indonesia, itu jauh sebelum ribut ini,” tutupnya. ◦ Soemitro

“Kalau Setya berani *nyatut* nama Jokowi-JK, enggak mungkin dia berani begitu sendirian. Saya ga terlalu yakin kalau sendirian. Bisa saja itu sepengetahuan Jokowi-JK. Itu ga sedikit, itu miliaran dolar bukan miliaran rupiah,” tandas Budyatna.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, yang namanya disebut hingga 16 kali dalam transkrip rekaman bukti laporan di MKD mempertanyakan langkah Menteri ESDM. Luhut juga membantah klaim Sudirman bahwa laporannya ke MKD sudah sepengetahuan Presiden Jokowi.

“Langkah itu bukan instruksi presiden. Kami tidak ada waktu melakukan langkah hukum. Menurut kami itu aneh. Mengapa dilaporkan oleh menteri Sudirman, tanya saja dia kenapa dia laporkan itu,” tegasnya dalam jumpa pers di kantornya,

Kamis (19/11)

Menurutnya, pemerintah tidak ingin membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Apalagi, Presiden Jokowi sejak awal menyatakan tidak akan melakukan negosiasi kontrak sebelum tahun 2019.

“Kami tidak punya atensi atau keinginan negoisasi perpanjangan kontrak sebelum 2019. Anda pegang itu, Presiden tidak mau. Dia selalu katakan, *smelter* harus jadi, *local content* harus ada, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan,” kata Luhut.

**Rekaman Abal-abal?**

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bergerak cepat menanggapi laporan Sudirman. Besarnya atensi publik terhadap masalah ini membuat MKD terus menyoroti setiap langkahnya.

## Ada Indikasi Korupsi di Kontrak JICT



Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Dani Rusli (kiri) bersama mantan Dirut JICT Riza Erivan mengikuti rapat dengan Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Wakil Ketua Pansus Pelindo II Teguh Juwarno meyakini ada indikasi korupsi dalam perpanjangan kontrak JICT, selain temuan kejanggalan penandatanganan.

Kejanggalan tersebut diantaranya perpanjangan yang semula dilakukan oleh Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH), namun ditemukan perpanjangan dilakukan antara Pelindo II dan JICT. Sebab, kontrak perpanjangan ditandatangani oleh Dirut Pelindo II dan Dirut JICT.

“Iya kalau kita melihat dari sini ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memang melakukan ibaratnya penggelapan atau namanya dalam terminologi ekonomi itu *financial engineering*. Mereka bermain-main, sengaja, pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan,” ujar Teguh di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Untuk itu, diperlukan penelusuran PPAK untuk melihat kemana sebenarnya aliran dana yang disembunyikan.

“Karena begini, persoalannya juga bukan dana, tapi juga komposisi saham setelah perjanjian itu dilakukan amandemen,” sebutnya.

Teguh menjelaskan, perjanjian yang diamandemen dimaksud komposisinya HPH 51 persen dan pelindo II 49 persen, namun

kemudian menjadi 51 persen untuk pelindo II dan 49 persen untuk HPH. Dalam valuasi yang dilakukan tim bersama, termasuk FRI dan Bahana, Pansus melihat sebenarnya nilainya untuk HPH tidak lagi 49 persen tapi mungkin sudah sekitar 26 persen.

“Maka ada sekitar 23 persen menjadi tanda tanya besar ini kemana? siapa ini, jangan-jangan ada ‘papa minta saham’ juga disitu,” cetus Politisi PAN itu.

Terkait hal tersebut, menjadi sangat relevan untuk Pansus meminta PPAK menelusurinya. Pansus juga meminta 7 dokumen dari JICT untuk menyelidiki kejanggalan-kejanggalan tersebut.

Adapun 7 dokumen dimaksud, yakni:

1. Laporan keuangan 1999-2014
2. *Agreement* perubahan komposisi saham Pelindo 51 persen, HPH 49 persen, KOPEGMAR 0,01 persen
3. Pembayaran LOAN 2009
4. *Invoice* pembayaran *technical KNOW HOW* ke Seaport BV
5. Nomor rekening US dollar dan IDR sejumlah enam rekening
6. Bukti pembayaran rental cost pada tanggal 1 September dan 3 November 2015
7. SK pengangkatan Direksi yang baru

Karel Stefanus Ratulangi-Nailin In Saroh

## MKD: Menteri Sudirman Said Alihkan Isu Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Freeport?

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Supratman Adi Aghtas mengatakan jika dirinya berharap permasalahan kode etik Ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said tidak menutupi isu besar yang jauh lebih penting yakni persoalan PT Freeport Indonesia yang *ogah* menjalankan kewajibannya.

“Persoalan etik ini jangan sampai menutupi persoalan Freeport. Ini harus hati-hati. Mari kita kawal agar permasalahan ini kembali ke jalannya. Karena esensinya kita itu ingin Freeport bisa menguntungkan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia khususnya masyarakat Papua,” kata Supratman di komplek gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/11).

Ia menjelaskan, jika dilihat secara jeli, persoalan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto tidak lebih besar dari pelanggaran yang dilakukan oleh Sudirman Said ketika melayangkan surat kepada pemegang saham tertinggi Freeport untuk mengisyaratkan kepastian beroperasi di Indonesia. Terlebih surat tersebut pun dengan mengatasnamakan Negara Republik Indonesia.

“Kalau jeli dari awal, menurut saya kalau yang dilaporkan Sudirman Said soal Setnov ini kan dalam ranah etik, tapi menurut saya, dengan Sudirman mengirim surat ke Freeport pun ini sudah masuk ranah pidana. Untuk itu penegak hukum harus jeli juga melihat ini, karena ada upaya menjanjikan sesuatu kepada Freeport,” ungkap dia.

Menurut dia, dengan melihat situasi yang berkembang hingga saat ini, wajar saja jika publik menilai apa yang diramalkan Sudirman Said sebagai upaya mengalihkan isu yang jauh lebih penting.

“Kalau publik melihat ini sebagai pengalihan isu itu ya sah-sah saja,” tutup dia. /Ismed Eka-Dhanu Akbar

## PTDI Sarankan Beli Helikopter Buatan Sendiri

Rencana TNI-AU membeli helikopter AW-101 buatan Italia dinilai tidak tepat oleh PT Dirgantara Indonesia.

“Helikopter AW-101 memiliki tiga *engine*, sehingga cenderung menimbulkan tanda tingkat kepanasan lebih tinggi dan mudah dideteksi pencari panas (menjadi sasaran tembak senjata dengan pencari panas), berbeda dengan helikopter EC-725 yang hanya dua *engine*,” kata Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/11).

PTDI merekomendasikan TNI-U untuk membeli helikopter buatan dalam negeri yakni tipe EC-725. Arie mengatakan pembelian helikopter AW-101 membutuhkan investasi tambahan, berupa pengadaan bengkel, fasilitas penunjang dan pelatihan pilot serta teknisi yang memakan waktu.

Sedangkan pembelian EC-725 dipercaya tidak akan membutuhkan investasi tambahan karena EC-725 merupakan pengembangan dari helikopter superpuma yang selama ini digunakan Presiden dan Wakil

Presiden RI.

“PTDI sudah mengembangkan superpuma menjadi EC-725, yang teknologinya tidak berbeda jauh dengan AW-101. Dengan EC-725, artinya bisa menggunakan pilot superpuma, penguasaan teknologinya lebih mudah,” tuturnya.

Arie menekankan fitur-fitur yang ada pada helikopter EC-725 juga sudah sangat layak untuk VVIP sekelas kepala negara. Helikopter jenis ini sudah digunakan oleh sedikitnya 32 kepala negara di seluruh dunia.

“Di setiap unit helikopter EC-725 PTDI terlibat dalam pembuatan ‘fuselage’ (badan) dan ‘tailboom’ (buntut) serta melakukan kustomisasi sendiri,” jelasnya.

Menurut Arie, helikopter untuk kepala negara seyogyanya dibuat dan dirakit di negara asal, agar menjamin keamanan kepala negara.

Dia menyampaikan apabila Presiden berminat menggunakan helikopter EC-725 maka PTDI siap menyelesaikannya pada akhir tahun 2016. /Karel Stefanus Ratulangi-Ant



Sejumlah teknisi menyelesaikan proses produksi Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11).

## PBNU Minta Umat Islam Wajib Tolak Ajaran ISIS

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menuturkan, umat Islam wajib menolak ajaran ISIS maupun aliran Islam garis keras lainnya, karena ajaran itu sangat berbahaya dan jika mereka datang ke Indonesia harus ditolak.

“Kita kaum intelektual NU, harus siap menghadapi fitnah ISIS dan jika mereka datang ke Indonesia, maka wajib hukumnya untuk menolak ajaran dan fitnah tersebut,” kata Said Aqil Siradj di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Menurutnya, ISIS mempunyai agenda untuk memperluas wilayah kekuasaannya, dimana tahun 2017 ISIS merencanakan menguasai wilayah Asia dan di tahun 2022, ISIS akan mendirikan suatu khalifah yang beribukotakan di salah satu negara yang ada dibekas jajahan Soviet.

“Agenda ISIS pada 2017 harus menguasai Asia dan 2022 menguasai dunia dengan khalifah yang beribukota di salah satu negara bekas jajahan Soviet,” ujar Said.

Ia menambahkan semua warga negara Indonesia umumnya dan khususnya warga NU, harus tolak jika ada ajaran asing yang masuk ke Indonesia dan ajaran itu mengindikasikan ajaran keras itu wajib hukumnya ditolak.

“Ajaran asing yang masuk ke Indonesia harus di tolak karena ajaran itu bisa memecah belah antara warga negara,” tambahnya.

Ia juga menekankan setiap individu wajib membela negaranya dari perpecahan dan adu domba orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti fatwa KH Hasyim Asy’ari bahwa membela Tanah Tir adalah *fardhu ‘ain*.

“Setiap individu wajib membela tanah air,” imbuhnya.

Said juga mengimbau para aparat keamanan negara supaya tidak kecolongan lagi dengan kelompok radikal. /Zaenal Arifin-Ant



# MEMBANGUN INDO

**OLEH: OLLY DONDOKAMBEY**

Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan; Penulis buku "Membumikan Trisakti Melalui Nawacita" (Jakarta: Parrhesia Institute, 2015).

**P**ada jaman Orde Baru pembangunan Indonesia sangatlah sentralistik. Pada jaman Soeharto, pusat memang mengatur semua piring-nasi daerah. Sistem pemerintahan terpusat (*state center*) yang berlangsung selama 32 tahun segera beralih menuju otonomi Daerah (Otda) dengan pemberlakuan UU No.32/2004, tentang Otonomi Daerah yang sudah direvisi menjadi UU No.24/2014, tentang Pemerintah Daerah.

Konsep pembangunan sentralistik harus berubah. Biarkan pusat-pusat industri mengalir ke daerah-daerah lain. Sistem pertanian dan pola produksi pertanian, kelauatan di daerah-daerah pinggiran juga harus berubah. Ini membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang membangun Indonesia. Membangun Indonesia, bukan mulai dari kota, tetapi mulai dari daerah, desa dan pinggiran. Daerah adalah lokus pertanian, tambang, keluatan. Tanpa membangun daerah pinggiran, kita akan terus dicap sebagai negara gagal.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah menggagas pembangunan Indonesia dari pinggiran dan desa dalam visi-misinya NAWACITA yang merupakan turunan operasional dari gagasan besar TRISAKTI Bung Karno. Itu artinya, sentra pembangunan dan industri mekar dari desa agar pemerataan dan keadilan sosial terwujud. Desa juga menjadi pusat produksi pertanian. Langkah pemerintahan Jokowi

dalam pembangunan desa misalnya, tampak jelas pada peningkatan alokasi anggaran untuk desa. Pada tahun 2015 misalnya, pemerintah mengalokasikan dana desa mencapai Rp20.7 triliun untuk 434 kabupaten/kota, 74.000 desa di seluruh Indonesia.

Data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri melalui Lampiran I Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2015 oleh Menteri Dalam Negeri dari sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri per semester I Bulan Juni Tahun 2014 disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.412 Kelurahan dan 74.093 Desa.

Paling tidak ada dua alasan mengapa desa perlu diberdayakan. **Pertama**, republik ini dikenal sebagai negara agraris, karena komposisi terbesar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS/2011) misalnya, mencatat dari 30.02 juta penduduk miskin, 18.97 juta berada di daerah pedesaan dan 66 persen di sektor pertanian. Namun, angka itu hanya administratif belaka. Wajah pembangunan pasca pemberlakuan Otonomi Daerah (Otda) secara sistematis menggerus kehidupan petani miskin di pedesaan.

**Kedua**, bagian dari mengupayakan revolusi mental



Jokowi. Sudah sering desa diidentikkan dengan ketertinggalan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng, dan kemiskinan, desa harus semakin diperkuat dan menjadi perhatian. Penduduk desa seringkali pergi ke kota dan meninggalkan potensi-potensi yang ada. Dengan kata lain, dalam banyak hal desa menggambarkan potret bangsa Indonesia. Seringkali mengabaikan potensi yang ada, dan bergantung pada kekuatan dari luar.

Dengan melihat potensi di daerah, sangatlah masuk akal jika pemerintah mulai membangun Indonesia dari pinggiran atau daerah. Dalam tulisan ini, saya ingin membatasi pada

# ONESIA DARI PINGGIRAN



daerah-daerah di Indonesia Timur. Sejak jaman Orde Baru sampai era reformasi Indonesia Timur boleh dikatakan selalu diabaikan pemerintah pusat. Transfer pusat-daerah untuk biaya pembangunan sangat minim. Perhatian pemerintah terhadap transportasi udara, laut dan darat hampir minim.

Belanja modal yang disiapkan pemerintah daerah di kabupaten/kota/propinsi di Indonesia Timur juga kelihatan sangat minim. Padahal, dana belanja modal ini penting untuk pembangunan infrastruktur publik seperti, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, irigasi dan sederetnya. Dari

pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, kebanyakan jalan raya dan transportasi darat di Indonesia Timur masih sangat jauh dari harapan. Tidak heran jika indeks pelayanan publik kabupaten/kota di Indonesia menunjuk angka menurun setiap tahun. Padahal, infrastruktur publik, seperti jalan raya sangat penting agar rakyat dapat mengakses dan megneanal pasar. Risikonya, rakyat sulit menjual hasil penenan mereka ke pasar. Selain jalan raya, akses ke air minum bersih dan penerangan (listrik ) juga sangat sulit.

Lemahnya pelayanan publik menyebabkan daerah ini kerap dinobatkan sebagai daerah yang menelan ekonomi biaya tinggi. Daerah yang ekonominya berbiaya tinggi biasanya mempersulit masuknya investasi dan daya saing daerah di pasar nasional dan global menjadi lemah.

Padaahal, Indonesia Timur yang merentang dari Sulawesi, Papua sampai Nusa Tenggara adalah daerah yang kaya potensi sumber daya. Papua kaya dengan hasil kekayaan sumber daya alam, berupa minyak dan gas. Di Papua perusahaan migas besar, BP Tangguh, beroperasi. Di Papua juga raksasa tambang Trans National Corporation, Freeport Indonesia sudah lama menancapkan sayap bisnisnya menambang emas dan tembaga di Grasberg, sejak tahun 1967. Maluku juga daerah kaya sumber daya mineral, seperti nikel dan bauksit. Di Maluku, PT Weda Bay Nickle (Eremet/Prancis) mengoperasi

tambang nikel potensi. Maluku juga terkenal dengan blok gas terbesar, setelah blok Mahakam, Blok Masela yang dioperatori INPEX Corporation (Jepang) dan Total E&P (Prancis). Sementara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara adalah daerah kaya sumber mineral, nikel, aspal dan emas. Nusa Tenggara Timur kaya dengan potensi kelautan dan wisata Bahari yang berpusat di Taman Nasional Komodo. Namun, perhatian pemerintah pusat terhadap potensi dan kekayaan daerah ini sangatlah minim.

Risikonya, angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia Timur sangatlah besar. Simak saja angka kemiskinan beberapa propinsi di Indonesia Timur berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2014 yang masih cukup besar.

Maka, Pemda mesti memiliki politik indifference: berani tampil beda. Di saat ekonomi dunia ramai-ramai mendorong investasi berskala besar, pemerintah wajib membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Politik indifference juga sebagai strategi menyelamatkan SDA dari jarahan korporasi global-lokal. Ini memerlukan Pemda yang memiliki visi membangun masa depan daerah dan solider dengan kehidupan rakyat kecil.

Tugas pemerintah adalah menyediakan akses ke pasar, membangun infrastruktur publik dan menjaga harga, sehingga petani mendapat insentif untuk lebih



produktif dan menghargai pekerjaan sebagai petani. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum digalakkan. Sinergi kerja antara pemerintah pusat-daerah perlu ditingkatkan agar tak ada lagi urbanisasi besar masyarakat desa ke kota dan yang lain menjadi budak di negeri Jiran.

### Membangun Struktur Perekonomian Kuat

Tak ada negara di dunia ini yang bisa maju dan berkembang pesat tanpa pembenahan infrastruktur pusat-daerah. Pemerintah Jokowi-JK, kelihatan sangat serius membenahi infrastruktur publik, bukan hanya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga di Indonesia Timur. Pembenahan infrastruktur publik itu bisa kita cermati mulai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Jokowi-JK telah merevisi anggaran negara tahun 2015. Jika kita cermati secara teliti, anggaran untuk pembangunan infrastruktur naik 60 persen dibandingkan periode sebelumnya. Revisi menjadi Rp 1984 triliun (kurs

Rp 12.500). Porsi budget negara terbesar dialokasi untuk belanja infrastruktur senilai Rp 119 triliun, meningkat sekitar Rp34 triliun dari APBN awal tahun 2015. Dana sebesar itu digunakan untuk membangun 15 bandara, 24 pelabuhan dan galangan kapal. Lainnya digunakan untuk pembangunan proyek Jalan Tol, Trans Jawa, Trans Sumatera, Rel Kereta Api di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Pendanaan 24 pelabuhan bukan hanya berasal dari dana belanja modal. Pemerintah Jokowi-JK juga mengajak investor swasta lokal-global untuk berperan serta dalam pembangunan infrastruktur publik, seperti pelabuhan dan kereta api. Ukuran 1.000 itu target yang akan dikerjakan pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara, untuk transportasi udara, pemerintahan Jokowi-JK, melalui Kementerian Perhubungan dan Transportasi, sudah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan bandara Enggano, Kertajati, Singkawang (Kalimantan Barat), Muara Tewah ( Kalimantan Tengah), Tojo Una-Una (Sulawesi),

Maluku, Papua. Pemerintah juga membangun 26 kapal dan 5 galangan kapal dan 500 unit galangan kapal untuk transportasi laut. Pemerintah memprioritaskan menggggenjot produksi domestik di 12 propinsi, seperti Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi juga berambisi membangun Tol Laut yang menghubungkan satu pulau ke pulau laut di Indonesia. Jokowi adalah Presiden pertama yang memiliki visi membangun maritim Indonesia melalui pemberdayaan wisata bahari dan program Tol Laut. Pertanyaannya adalah sampai di mana saja pekerjaan proyek tol laut itu?

Anggaran untuk program ini sudah disepakati pada Februari 2015. Ada dua pos utama untuk Tol Laut. Pertama, anggaran untuk kementerian Perhubungan dan Transportasi, yang naik tajam dari Rp44.9 triliun (jaman SBY-Boediono) menjadi Rp65 triliun (Jokowi-JK). Kedua, Injeksi modal ke perusahaan

milik negara, BUMN, termasuk Rp2 triliun untuk Pelindo IV (untuk pengelolaan pelabuhan), Rp500 miliar untuk PT Pelni (Pengapalan), Rp350 miliar untuk Djakarta Lioyd (Kapal) dan Rp1 triliun untuk PT ASDP (Jasa kapal fery).

Program utama termasuk pembangunan 7 pelabuhan di Indonesia Timur, pembangunan pelabuhan di 77 lokasi di Indonesia Timur dan pembangunan untuk terminal fery di 65 lokasi. Pemerintah akan memulai operasi galangan kapal dengan nilai Rp30 miliar pada 7 bulan tahun 2015. Kapal akan mengangkut dari Waingapu (NTT) ke Cirebon (Jawa Barat).

Tahun 2015, Kementerian Transportasi telah meresmikan konstruksi 8 kapal untuk angkutan di pulau terluar Indonesia, yang terdiri dari 7 unit dengan 750 DWT dan dua unit untuk 500 DWT. Kapal telah dibangun juga 4 kalangan kapal dengan nama galangan PT Dumas Tanjung Perak,, PT Adiluhung Sara Segara Indonesia, PT Mariana Bahagia dan PT Dok Bahari Nusantara. Konstruksi akan selesai selama 14 bulan, sehingga kapal akan dijadwalkan dikirim tahun ini. Kapal-kapal itu akan beroperasi di bagian Indonesia Timur, seperti Makasar, Kendari, Bima (Nusa Tenggara Barat, Tilamuta, Babang dan Sanana.

Kapal-kapal itu beroperasi di Makasar, Kendari, Bima, Talimuta, babang dan Sanana. Operator kapal fery milik negara, PT ASDP Indonesia, telah melakukan tugasnya mengoperasikan 5 jasa pelayanan kapal di wilayah Indonesia Timur sejak Agustus, 2015. Kapal-kapal itu, seperti KMP Lema untuk Sorong-Waigeo (Papua), KMP Eranu untuk Kaimana-Tual (Maluku), KMP Ile Laalekan untuk Kupang (NTT)-Hansisi (Maluku), KMP Moinit untuk Amurang-Toli-toli (Sulawesi Tengah) dan KMP Bambit untuk Marauke-Asmat (Papua).

Kementerian Transportasi juga telah meresmikan 15 Bandara di

Indonesia Timur dengan tujuan mempermudah konektivitas antara-Pulau. Bandara-bandara itu akan tuntas selama 5 tahun. Bandara-bandara lain diluar rencana itu antara, Muara Teweh (Kalimantan Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Buntu Kunik (Sulawesi Selatan), Kabir (NTT), Namniwei (Maluku) dan dua bandara di Papua.

Kementerian Perhubungan dan Transportasi menganggarkan dana besar senilai Rp105 triliun untuk membangun rel Kereta Api di luar Jawa sampai tahun 2019. Kementerian Perhubungan akan fokus mengoptimalkan jalur KA yang sudah ada yang sudah lama tak aktif lagi dan membangun jalur KA baru di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kementerian itu mengatakan akan membangun 6.500 km jalur KA di luar Jawa, hanya 3.500 Km yang aktif, kebanyakan bukan untuk transportasi, bukan untuk penumpang.

Jokowi adalah salah satu Presiden Indonesia yang dalam tiga kali setahun berkunjung ke Papua. Beberapa bulan lalu, Jokowi meresmikan pembangunan flyover yang menghubungkan Hamadi dan Holtekam di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Flyover itu dibangun dengan dana senilai Rp900 miliar dari dana pemerintah pusat dan Rp600 miliar dari pemerintah daerah. Flyover dapat mendorong koneksitas antara propinsi di Papua. Menteri PU, Basuki Hadimuljono mengatakan kementerian PU telah mengalokasikan dana senilai Rp6 triliun untuk pembangunan proyek di Papua. Papua adalah daerah kaya akan sumber daya mineral dan laut.

Fakta dan data alokasi dana infrastruktur publik yang saya ulas di atas mau menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK benar-benar serius ingin membenahi pembangunan infrastruktur publik di daerah. Pemerintah juga ingin memberi perhatian khusus untuk Indonesia Timur agar terjadi pemerataan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur publik adalah elemen penting untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, Jawa bukan lagi menjadi pusat industri nasional, tetapi daerah-daerah juga memiliki daya tarik tersendiri bagi investor untuk masuk.

### **Belajar Dari China**

Pemerintahan Jokowi-JK rupanya belajar banyak dari negara-negara maju. Negara-negara di Asia Timur yang masuk dalam era industri pasca PD II kini merupakan negara investor utama. Wajar jika rombongan pencari investor bertandang ke negeri tirai bambu. Kemampuan RRC mendirikan negara, dan menjadi pemain utama dalam G2, tidak pernah dipelajari. Para ekonom Indonesia maupun pengikutnya, cuma mengerti di sana ada uang (baca: investor). Sebaliknya proses bernegara di keempat negara Asia Timur ini tidak dipahami. Dalam kajian Wertheim (1997), yang membandingkan antara Indonesia dan RRC, RRC mulai membangun pasca 1949 dengan fokus pada persoalan pangan. Dalam skema itu, persoalan kelaparan merupakan prioritas utama sebelum beranjak ke ranah yang lain.

Pasca transisi kepemimpinan ke tangan Deng Xiaopeng, ia pun membuka daerah pinggiran sebagai 'ajang uji coba pasar'. Itu pun dilakukan bertahap di tahun 1980-an. Proses pembangunan adalah bagian dari strategi, jadi bukan karena kalap dan ada dalam posisi ditawan. Pasca transisi kepemimpinan ke tangan Deng Xiaopeng (1980-an), negeri itu membuka daerah pinggiran dan membangun infrastruktur publik, seperti jalan raya dan sektor rill. Strategi seperti itulah yang kita harapkan mekar dari daerah.

Pemerintahan mesti belajar strategi pembangun Cina yang mulai membangun pasca 1949 dan paska reformasi. Cina meletakkan persoalan kelaparan sebagai prioritas utama sebelum beranjak ke ranah lain. Dan China mulai besar dengan membangun dari pinggiran. ◦

# BABAD TANAH FREEPORT

PT Freeport Indonesia terus menjadi perhatian publik. Tambang emas dan tembaga di perut Papua, Indonesia itu, kini tengah menghadapi sengketa kontrak.

## 1936:

Jean Jacques Dozy, seorang ahli Geologi Belanda menemukan area Ertsberg (*Belanda*: "gunung ore") di Papua. Penemuan ini dituangkan dalam sebuah makalah yang sempat terabaikan selama 23 tahun.

## 1959:

Forbes Wilson, Kepala Eksplorasi Freeport Sulphur Co, mempelajari laporan Dozy ini dan kemudian mendatangi Ertsberg.

## 1961:

James (Jim Bob) Robert Moffet lulus dari University Of Texas dengan gelar Sarjana Geologi.

## 1965:

Dengan persetujuan dan bantuan AS, Jenderal Soeharto pada saat itu diangkat menjadi Presiden Indonesia.

## 1967:

Freeport menjadi perusahaan pertama yang menandatangani Kontrak Karya (KK) I dan menjadi landasan aktivitas penambangan Freeport di bumi Papua.

## 1968:

Moffett bersama Ken McWilliams dan BM Rankin Jr. membentuk McMoRan Oil & Gas Co, dimana dalam tiga tahun kemudian menjadi penguasa ladang minyak di Texas Selatan.

## 1972:

Freeport Sulphur memulai aktivitas penambangan di Ertsberg, permasalahan di lapangan muncul seperti cuaca dan titik eksplorasi 4.100 meter di atas permukaan laut.

## 1977:

Warga suku Amungme (suku desa setempat) meledakkan dinamit di sebuah pipa penambangan. Militer Indonesia merespon keras dengan mengeksekusi 900 orang warga.

## 1980:

Freeport dan pemerintah Indonesia merelokasi warga suku lokal ke dataran rendah dan di tahun yang sama James Moffet menjadi CEO McMoRan Oil.

## 1981:

McMoRan Oil bergabung dengan Freeport Sulphur, sebuah perusahaan yang berskala dua kali lebih besar dari McMoRan Oil.

## 1988:

Karena aktivitas pabrik pupuk di Louisiana, Freeport-McMoRan dijuluki sebagai penyebar polusi air terbesar di Amerika oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS.

## 1989:

Departemen Geologi University Of Texas menandatangani kontrak senilai 1 Juta USD dengan Freeport untuk mengeksplorasi tambang di Indonesia.

Lebih dari 66% penduduk miskin Papua adalah penduduk asli yang tinggal wilayah operasional tambang Freeport

60% pendapatan utama Freeport-McMoran dari hasil eksplorasi tambang PTFI di Papua



Freeport mengelola 50% cadangan emas Indonesia

Freeport memproduksi 62 ton bijih emas per hari dan sekitar 1.430 ton sisa cadangan emas hingga tahun 2041

## 1995, April:

Dewan Australia untuk Bantuan Luar Negeri (ACFOA) merilis laporan tentang puluhan pelanggaran HAM di tambang Freeport.

## 1994, Desember:

Terjadi bentrokan dalam demonstrasi yang dilakukan warga lokal di sekitar tambang, sedikitnya tiga orang tewas akibat insiden tersebut.

## 1994, Juli:

Ilmuwan dari OPIC (Overseas Private Investment Corporation) mengunjungi tambang Grasberg untuk menyelidiki masalah perusahaan lingkungan yang dilakukan PT. Freeport.

## 1993:

Produksi tambang mencapai 62.000 ton bijih per hari.

## 1991:

Ditemukan lahan penambangan baru di Grasberg, berdekatan dengan Ertsberg. Atas penemuan tersebut, Freeport memperkirakan hasil produksi di masa depan mencapai lebih dari 12 miliar pon tembaga, 20.6 juta ons emas, dan 22.8 juta ons perak.

### 2005, Juli:

- Global Witness meluncurkan sebuah laporan yang mengatakan Freeport telah menyuap pimpinan militer Indonesia.
- Produksi tambang Grasberg mencapai 220.000 ton bijih per hari.
- Freeport melaporkan bahwa pada paruh pertama tahun 2005, pendapatan mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,7 miliar USD, dan pemegang saham perusahaan aka diberi dividen tambahan 50 sen per saham.
- Lubang galian tambang Grasberg mencapai diameter 2,4 km yang meliputi luas 499 ha dan sedalam 800 m.

### 2003, Oktober:

Longsor besar di tambang Grasberg sisi selatan menyebabkan 2,3 juta ton batuan dan lumpur runtuh. Menewaskan 8 orang, melukai 5 lainnya dan 6 orang tidak ditemukan.

### 2002:

Patsy Spier dan Rick (WNA AS) beserta beberapa orang yang lain disergap di sebuah jalan dekat area tambang. Terjadi penembakan yang berakibat 3 orang tewas.

### 2001:

Theys Hiyo Eluay, pemimpin gerakan kemerdekaan Papua Barat diculik dan dibunuh.

### 1998:

Freeport menghadapi gelombang penolakan dari rakyat Indonesia serta melemahnya dukungan dari AS. Disaat bersamaan, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

### 1995, Desember:

Produksi bijih emas Freeport mencapai 115.000 ton bijih per hari dan terus memperluas produksi hingga 160.000 ton.

### 1995, November:

Departemen Geologi UT membatalkan jadwal makan malam dalam acara penghormatan untuk Moffett, dengan alasan Moffett telah merencanakan konflik yang terjadi di area penambangan Freeport.

### 1995, Agustus:

Gereja Katolik Jayapura mengeluarkan laporan tentang pelanggaran HAM di tambang yang menguatkan temuan ACFOA sebelumnya, serta konfirmasi dari Komnas HAM terkait hal serupa.

### 2006, Februari:

Aparat gabungan Kepolisian bersama pihak keamanan Freeport mengusir penduduk yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport di Kali Kabur Wanamon. Terjadi bentrok dan penembakan. Warga menduduki dan menutup jalan akses ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg.

### 2006, Maret:

Kementerian Lingkungan Hidup RI mempublikasi temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan. Hasilnya, Freeport dinilai tak memenuhi batas normal air limbah dan telah mencemari air dan biota laut.

### 2006, April:

9.000 karyawan Freeport mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan pada 21 April setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai kenaikan gaji terendah.

### 2010:

Berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 status Freeport sudah harus berubah menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), namun statusnya masih Kontrak Karya.

### 2011:

Saham Freeport McMoRan induk dari PT Freeport Indonesia di bursa saham Newyork AS mencapai USD 60 / lembar.

### 2014, Juli:

Freeport masih mendapat keringanan melakukan ekspor konsentrat atas persetujuan MoU dengan Menteri ESDM walau tanpa melalui hasil pemurnian.

### 2014, September:

Terjadi kecelakaan dalam kegiatan operasional penambangan, 4 orang pekerja tewas dan 5 lainnya terselamatkan.

### 2015, November:

Saham Freeport-McMoRan di bursa saham Newyork AS anjlok mencapai USD 8 / lembar karena guncangnya situasi politik Indonesia terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.



### Ertsberg (1967-1988)

Inilah tambang pertama milik PT Freeport Indonesia. Ertsberg kini tinggal berupa kawah besar dengan air berwarna kehijauan. Sudah tidak ada aktivitas pertambangan lagi di Ertsberg.



### Grasberg (1991-Sekarang)

Kawah pegunungan Grasberg berdiameter 4 km, berkedalaman 1.785 meter, ketinggian 4.285 mdpl. Hingga saat ini kegiatan penambangan masih terus berlangsung.

# Freeport Bikin Repot

Kontrak pertambangan dengan Freeport itu juga yang pertama kali menandai kontrak yang menguntungkan perusahaan asing.



jadiannya mirip, atau mungkin berulang. Pada 15 Januari 1998, dengan kedua tangan terlipat, Direktur Pelaksana IMF Michael

Camdessus melihat (mungkin ingin memastikan) Soeharto sudah benar menekan *letter of intent* (LoI) yang sudah dirancang Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sebelumnya.

Kejadian yang sama juga

diterima Soeharto pada 1967. John D Rockefeller Jr saat itu juga menyiapkan sebuah draf undang-undang (UU) untuk ditandatangani Soeharto. Presiden Indonesia ke dua ini juga dipaksa untuk membubuhkan tanda tangan di beberapa carik kertas UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

John D Rockefeller Jr adalah anak dari John D Rockefeller Sr. Sang ayah merupakan industriawan terkaya sepanjang sejarah, sekaligus filantropis terbesar dunia. Kebesaran

dan kesuksesan Standard Oil adalah bukti nyata kesuksesan John.

Nama John D Rockefeller Sr juga tak bisa lepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tanpa sumbangan Rockefeller Foundation mungkin PBB tidak akan pernah ada! Bahkan, dana operasi awal sampai tanah tempat markas PBB berpijak adalah sumbangan dari Rockefeller Foundation. Konon, sepanjang hidupnya John telah menyumbangkan seluruh harta kekayaannya dan menyisakan USD



*Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9).*

25 juta untuk dirinya sendiri.

Di Indonesia, Yayasan Rockefeller pernah banyak berkiprah pada dekade 1970 dan 1980-an melalui program pemberian beasiswa bagi dosen dan peneliti lembaga-lembaga pendidikan/penelitian milik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Yayasan ini juga terkenal karena membantu pelaksanaan Revolusi Hijau (termasuk di Indonesia) dan sejumlah program pemberantasan penyakit menular.

Bicara soal UU No 1/1967 tentang PMA, dalam sejarah, ini adalah UU pertama negara bangsa ini yang berhubungan langsung dengan perusahaan asing. Perusahaan asing itu bernama Freeport Sulphur, sebelum berganti nama menjadi Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Kontrak pertambangan dengan Freeport itu juga yang pertama kali menandai kontrak yang menguntungkan perusahaan asing. Maklum, ketika Soekarno masih pejabat presiden, kontrak

dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia.

Tandatangan Soeharto di UU No 1/1967 itu bukan momen kilat. Ada cerita panjang kenapa Soeharto tandatangan di UU itu. Kisahnya bermula pada 1936. Seorang Prancis bernama Jean Jaques Dozy menulis sebuah laporan penelitian, tepatnya mungkin sebuah catatan perjalanan ilmiah di Gunung Esberg, Papua Barat. Catatan Dozy ini tersimpan lama di perpustakaan Belanda sebelum seorang Belanda, Direktur

Pelaksana East Borneo Company Jan van Gruisen menemukan dan melahap habis isi laporan itu.

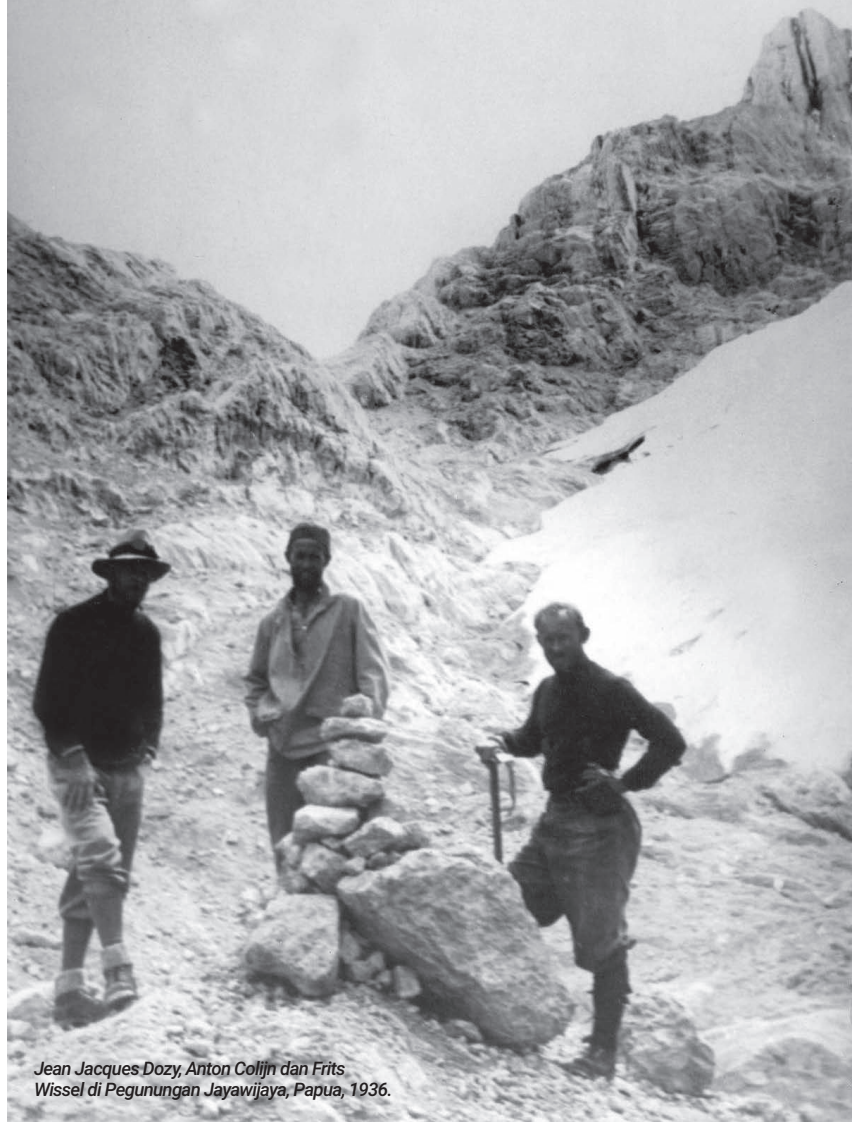
Gruisen mendiskripsikan laporan Dozy soal Gunung Esberg di Papua Barat itu sebagai sebuah temuan yang sangat luar biasa. Dozy bercerita tentang keindahan dan kekayaan alam Papua Barat yang sangat indah dan melimpah. Khusus untuk Gunung Esberg, Dozy menggambarkan bahwa ada bijih tembaga yang bisa langsung dipungut dari permukaan tanah di gunung itu, tanpa harus menggantinya.

Cerita Gruisen itu didengar oleh pengusaha tambang kaya asal Amerika Serikat, Forbes Wilson. Rupanya dia tertarik dengan cerita itu. Sebab, saat itu, Wilson lagi kelimpungan akibat ulah Fidel Castro yang menasionalisasi perusahaan asing yang ada di Kuba. Freeport Sulphur, perusahaannya yang sudah siap menghasilkan nikel di sana gagal jadi tambang uangnya. Tak salah kalau dia tertarik dengan cerita tembaga yang hanya tinggal pungut di Gunung Grasberg.

Lisa Pease menulis cukup apik soal Forbes Wilson ini dalam sebuah tulisan berjudul John F Kennedy, Indonesia, CIA and Freeport Sulphur. Dalam tulisan itu dikisahkan, pada 1959 (ketika Belanda masih menduduki Papua Barat) akhirnya Wilson menemui Gruisen.

Singkat cerita, akhirnya Wilson memutuskan untuk melakukan survei lanjutan dengan menggunakan dasar laporan survei awal yang dilakukan Dozy. Dan memang Wilson menemukan 'harta karun terpendam' di Gunung Esberg. Bukan hanya tembaga, Wilson juga menemukan bijih emas dan perak di sana.

Tanpa menunggu waktu, pada Februari 1960, Wilson atas nama Freeport Sulphur dan Jan van Gruisen atas nama East Borneo Company melakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MoU) untuk bekerja sama mengambil bijih tembaga di sana. Spekulasi Wilson saat itu, Gunung Grasberg akan jadi pengganti kerugian Freeport Sulphur di Kuba.



*Jean Jacques Dozy, Anton Colijn dan Frits Wissel di Pegunungan Jayawijaya, Papua, 1936.*

Rupanya langkah Freeport Sulphur masuk Papua tidak semulus yang diduga Wilson. Papua saat itu masih menjadi masalah politik internasional. Sejak 1954, Soekarno sebenarnya sudah membawa masalah Papua Barat ini ke PBB. Langkah diplomasi Indonesia ini selalu gagal karena AS selalu berpihak ke Belanda atas pendudukannya di Papua Barat. Soekarno lantas hilang kesabaran.

Akhirnya, Sukarno memanfaatkan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Soviet. Seraya memutuskan diplomasi dengan Belanda pada Agustus 1960, Indonesia juga membeli persenjataan militer secara besar-besaran dari sejumlah negara Blok Timur untuk menekan AS.

“Harapan lenyap, kesabaran hilang, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak

memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami,” kata Soekarno saat itu.

Sejarah saat itu mencatat, Indonesia membeli peralatan perang besar-besaran dari Uni Sovyet, Italia, Jerman Barat, dan Yugoslavia. Langkah ini membuat Indonesia menjadi negara yang paling diperhitungkan di kawasan Asia.

Sekadar catatan, saat itu Indonesia punya 41 helikopter MI-4; 9 helikopter MI-6; 30 pesawat jet MIG-15; 49 pesawat buru sergap MIG-17; 10 pesawat buru sergap MIG-19; dan 20 pesawat pemburu supersonik MIG-21.

Itu belum tercatat 12 kapal selam kelas Whiskey; puluhan korvet dan satu buah kapal penjelajah kelas Sverdlow (sekarang KRI Irian); kapal perang jenis MTB (Motor Torpedo Boat) Klas Jaguar dari Jerman Barat;



Forber Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport do Erstberg pada 1967.



dari Freeport dan Caltex, dia diangkat sebagai direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan bank milik Rockefeller. Ini posisi yang sangat-sangat strategis, karena ini berkenaan dengan pengaturan dana-dana politik AS saat itu.

Lalu yang lebih mengejutkan lagi, empat bulan kemudian, pada Agustus 1965, Long diangkat Presiden AS untuk dijadikan dewan penasihat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Long dianggap punya pengaruh besar dalam operasi-operasi rahasia plus pendanaannya di negara-negara tertentu, termasuk Indonesia.

Meskipun penuh kontroversi, Long juga dianggap berperan dalam lingkaran besar skenario kudeta Sukarno oleh Soeharto. Kesuksesan kudeta dan bantuan pinjaman uang dari AS buat Indonesia pasaca kudeta itu bukan bantuan gratis. Soeharto harus membayar dengan bentuk lain.

Tak salah kalau ada spekulasi bahwa Long adalah tokoh penting di balik Rockefeller yang memaksa Soeharto menandatangani kontrak karya baru Freeport dengan Indonesia pada 1969 sebagai balas jasa mendukung Soeharto sebagai presiden Indonesia.

Mulai saat itu, cerita dan episode soal Papua terus berlanjut. Ini sekadar catatan sejarah bahwa akar masalah Papua Barat saat ini bukan soal kemerdekaan Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tapi kepentingan Freeport, dan AS atas apa yang terkandung di Gunung Grasberg. Titik. o Faizal Rizki Arief

22 pesawat pembom ringan Ilyushin IL-28; 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16; dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel.

Ada juga 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14; 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B; dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules. Langkah Soekarno kali ini membuat John Fitzgerald 'Jack' Kennedy, presiden AS ke-35, gentar.

Proses diplomasi Indonesia di PBB selama delapan tahun berturut-turut yang selalu gagal akibat intervensi AS akhirnya mulai mendapat angin. Kennedy mulai longgar melihat masalah Papua Barat.

Situasi ini membuat Wilson kembali limbung. Di matanya, Kennedy yang dulunya bisa diandalkan untuk mem-backup MoU-nya dengan Gruisen ternyata kini lebih condong untuk membela Soekarno. Apalagi akhirnya, Kennedy memutuskan untuk meminta Belanda keluar dari Papua Barat.

Kemarahan Wilson memuncak. Ketika MoU nya dengan East Borneo Company ternyata ikut bubar bersama hangkangnya Belanda dari Papua Barat. Saat itulah, Freeport Sulphur

memutuskan untuk ikut 'berpolitik' untuk mendapatkan akses-akses ekonominya. Ketika Kennedy yang tewas ditembak pada November 1963 diganti oleh Presiden Lyndon Baines Johnson pada 1964, tercatat salah satu direktur Freeport saat itu, Augustus C.Long, adalah tokoh penting di balik keberhasilan pemilihan dan kampanye Presiden Johnson.

Lisa Pease cukup detail menggambarkan peran Augustus C Long. Lisa mencatat, di samping direktur di Freeport Sulphur, Long ternyata punya saham besar di perusahaan Texaco yang saat itu ternyata juga mengoperasikan perusahaan Caltex yang join dengan Standard Oil of California untuk eksplorasi minyak di Indonesia.

Bisa dibayangkan, betapa kesalnya Long ketika Soekarno pada 1961 secara sepihak membuat kebijakan baru bahwa dalam kontrak tambang minyak, 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex yang saat itu adalah operator minyak terbesar di Indonesia sangat terpukul.

Long yakin, agar bisnis Freeport dan Caltex bisa kembali lagi ke tangannya, maka satu-satunya jalan adalah Soekarno harus jatuh. Dan Lisa Pease juga mencatat bahwa pada Maret 1965, setelah Long pensiun

# Cukup Sudah Penjajahan Ekonomi Amerika Serikat di Papua

Freeport bukan sekadar hitung-hitungan investasi ekonomi, melainkan merupakan mata-rantai investasi politik dan simbol penjajahan ekonomi Amerika Serikat di Papua. Alhasil, benturan antara kepentingan nasional NKRI versus kepentingan asing, tak terhindarkan lagi. Beranikah Presiden Jokowi ambil sikap tegas hentikan kontrak karya sekaligus menasionalisasi Freeport?



Sejak Indonesia merdeka dari jajahan Belanda pada 17 Agustus 1945, Papua merupakan wilayah yang jadi sasaran strategis

pemerintahan Amerika Serikat yang mewakili kekuatan-kekuatan korporasi global di belakangnya. Bahkan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Foreign Affairs magazine sempat menyebut judul artikel yang ditulisnya “Americas’s Pacific Century” yang secara tersirat adanya desain besar untuk menguasai provinsi Papua berikut sumber daya alamnya yang kaya emas dan tembaga itu.

Desakan kalangan korporasi global di Washington untuk memperpanjang kontrak karya Freeport barang tentu tak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional AS untuk menguasai sektor energi/migas maupun tambang batubara. Seperti doktrin mantan Menteri Luar Negeri Henri Kissinger: Jika anda menguasai sektor energi dan migas, maka anda menguasai negara. Jika anda menguasai sektor pangan dan pertanian, maka anda menguasai

kehidupan rakyat.”

Maka Papua, jadi pertarungan besar bagi AS untuk dipertahankan karena kaya akan kandungan sumberdaya alam di bidang energi dan tambang batubara. Bukan itu saja. Sebagai pemasok sumberdaya alam, Indonesia dipandang menguntungkan bagi pengembangan industri Amerika Serikat. Diperkirakan hingga kini sudah lebih dari 300 perusahaan milik AS yang beroperasi di Indonesia, yang sebagian besar dana investasinya ditanam pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi.

Di sinilah Papua sebagai salah satu daerah penghasil sumberdaya alam di Indonesia, jadi amat penting bagi AS. Bukti nyata adalah beroperasinya beberapa perusahaan pertambangan dan energi AS di Papua seperti: PT Freeport McMoran, Conoco Philips, dan British Petroleum.

Namun sepak-terjang Freeport lah yang paling spektakuler sekaligus menggambarkan dirinya sebagai VOC gaya baru di Indonesia. Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indoneswia (Freeport) di Papua



*Pekerja memeriksa proses pengolahan biji tambang PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Mimika, Timika, Papua, Sabtu (14/2).*

dimulai sejak 1967 berdasarkan Undang-undang No 1 mengenai Penanaman Modal Asing, dan masih berlangsung hingga sekarang, yang berarti sudah 48 tahun. Hampir setengah abad. Namun meskipun



selama kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua telah mencetak keuntungan finansial yang besar bagi perusahaan asing, tapi hingga sekarang belum memberikan manfaat optimal bagi negara kita, Papua, maupun masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.

Mari kita telusur dulu sejarahnya. Begitu mendapat Kontrak Karya, Freeport dapat konsesi penambangan

di wilayah seluas 24.700 acres atau seluas kurang lebih 1000 hektar lahan. Masa berlaku kontrak karya yang pertama adalah 30 tahun. Pada 1991, kontrak karya diperpanjang jadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali 10 tahun. Sehingga kontrak karya tersebut akan berakhir pada 2021 jika pemerintah Indonesia menolak usul perpanjangan.

Bagi AS hal ini jelas merupakan

perkembangan yang cukup mengawatirkan mengingat kenyataan bahwa sejak kontrak karya diperpanjang oleh pemerintah Indonesia pada 1991, ternyata luas penambangan Freeport bertambah, dengan adanya Blok B seluas 6,5 juta acrs atau seluas 2,6 hektar lahan. Dari Blok B ini yang sudah dilakukan adalah kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres atau sekitar 203 ribu

hektar lahan.

Dilihat dari sudut pandang kepentingan strategis AS, bisa dikatakan situasi Papua di tempat Freeport beroperasi, dalam keadaan siaga satu. Betapa tidak. Saat ini di Darwin ditempatkan sekitar 22.750 personil pasukan Navy Seal AS, yang notabene dalam struktur kemiliteran AS dipandang sebagai “angkatan keempat” dan punya fungsi sebagai pasukan penyerbu, pasukan perintis dan pembuka jalan. Sekadar informasi, jarak tempuh Darwin ke Papua hanya 820 km. Tak heran jika pakar pertahanan Australia Profesor Dr Robin Tennant Wood dari Canberra University menilai bahwa penempatan 22.750 pasukan Navy Seal di Darwin itu merupakan ancaman terhadap Papua dan keutuhan NKRI.

Bagi AS dan kepentingan-kepentingan korporasi-korporasi tambang dan batubara yang berada dalam kendali kekuasaan dinasti Rockefeller, Papua memang sasaran strategis dan vital. Maka, memperpanjang kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia, jadi masalah yang amat mendesak bagi Washington.

Betapa tidak. Sejak Maret 1973, Freeport mulai pertambangan terbuka di Ertsberg, kawasan yang selesai ditambang pada 1980-an dan menyisakan lubang sedalam 360 meter. Pada 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung hingga kini.

Dari kedua eksploitasi di kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta emas telah mereka keruk. Pada Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 km pada daerah seluas 499 hektar dengan kedalam 800 m2.

Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut mengelola tambang serta

dampak lingkungan yang cukup menghancurkan dengan rusaknya bentang alam pengunungan Grasberg dan Ertsberg.

Belum lagi fakta bahwa melalui kontrak karya tersebut, betapa kecilnya royalti yang diterima oleh Indonesia. Betapa tidak. Untuk tembaga misalnya, kita hanya dapat royalti sebesar 1,5 persen dari harga jual, sedangkan untuk emas dan perak kita hanya dapat royalti sebesar 1 persen dari harga jual. Keterlaluannya memang.

Bahkan kontrak karya Freeport juga telah menabrak Undang-Undang No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, ditegaskan bahwa negara mengakui hak-hak adat sedangkan kontrak karya I Freeport justru memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat.

Lebih gilanya lagi, dalam salah satu klausul kontrak karyanya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area kontrak karyanya. Alhasil, isu lingkungan seringkali mencuat dalam kasus Freeport. Apalagi ketika tanah adat 7 suku yang antara lain adalah suku Amungme, diambil dan dihancurkan pada saat Freeport beroperasi.

Namun di atas semua itu, kontribusi Freeport terhadap pemerintah Indonesia baik royalti, iuran tetap, pajak serta dividen, Indonesia benar-benar dalam posisi yang dirugikan. Untuk royalti hanya dapat 1 persen (emas dan perak) serta 1-3,5 persen (untuk tembaga).

Kalau kita merujuk pada *press release* dari Freeport selama 2010 sampai dengan Juni, mereka mengklaim sudah memberikan kontribusi sebesar 899 juta dolar AS. Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah kontrak karya kedua ditandatangani) kontribusi mencapai 10,4 milyar (royalti sebesar 1,1 milyar dolar AS dan dividen sebesar 1 milyar dolar AS).

Selintas, angka di atas kelihatan besar sekali. Karena itu berarti total kontribusi mencapai Rp 90 triliun.

Tapi sesungguhnya itu kecil, karena sebenarnya kontribusi nyata mereka adalah di dividen dan royalti yang nilainya hanya mencapai sekitar Rp 18 triliun selama 18 tahun. Tegasnya, pihak Indonesia mendapatkan perolehan keuntungan yang kecil sekali.

Melalui perolehan keuntungan yang sangat besar seperti itu, ternyata hanya sebagian kecil pendapatan yang masuk ke kas negara dibandingkan keuntungan yang diperoleh Freeport. Bahkan kehadiran Freeport tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tersebut. Padahal, saat ini Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 34,5 persen tembaga dan 96,73 persen cadangan emas.

Yang lebih menyedihkan lagi, jumlah volume emas yang ditambang Freeport selama 21 tahun tersebut ternyata tidak pernah diketahui publik. Sehingga sempat mengundang kecurigaan kalangan DPR pada 2014 lalu bahwa jangankan ada manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Bahkan DPR komisi VI pada waktu itu sempat tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan secara sepihak oleh Freeport.

Meski kita tidak tahu persis jumlah volume emas yang ditambang Freeport selama 21 tahun, namun kenyataannya saat ini Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika yang merupakan penyumbang emas nomor 2 di Amerika setelah Newmont.

Inilah latarbelakang mengapa keluar UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang pada intinya UU tersebut melarang ekspor konsentrat yang belum diolah melalui pabrik olahan atau smelter. Jika UU tersebut dijalankan secara konsisten, perusahaan-perusahaan tambang asing seperti Freeport dan Newmont yang paling akan terkena dampak secara langsung mengingat selama ini Freeport tidak pernah transparan dan



*Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) mendengarkan penjelasan bersama Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (Kedua kiri), Kepala UP3K Nasional Nurpamudji (kiri) dan Regional President BP Asia Pasific Christina Verchere (Kedua kanan) dari Tangguh Site Manager Bimasakti Ediyono (kanan) saat meninjau lokasi Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, Senin (21/9).*

terbuka dalam menginformasikan berapa sesungguhnya kekayaan yang berhasil mereka raup dari penambangannya di Papua.

Sayangnya, ketika UU tersebut harus diberlakukan pada 2014, terjadilah penghianatan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY. Melalui keluarnya Peraturan Menteri ESDM Non 01/2014, Permen tersebut malah dibuat untuk memberikan hak—hak istimewa yang disamakan kepada Freeport dan Newmont.

Alhasil, Permen 01/2014 itu hakekatnya telah menghancurkan jiwa pasal 33 UUD 1945 yang telah dijabarkan melalui UU Nomor 4 tahun 2009.

### **Pertaruhan Hidup Mati AS di sektor Energi dan Migas**

Kehadiran Freeport di bumi Cendrawasih adalah bukti nyata adanya kolonialisme di Papua. Hal ini memang tak lepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan mitra penting AS di bidang migas dan energi. Bahkan Indonesia merupakan penerima investasi di bidang pertambangan yang cukup besar dari Amerika Serikat.

Dalam menysasar Papua sebagai daerah penghasil cadangan minyak, pada 2001 lalu Amerika terlibat dalam pengelolaan LNG Tangguh. Berdasarkan perkiraan

cadangan LNG di kawasan tersebut, Berdasarkan data pada 2005, perkiraan cadangan LNG di kawasan tersebut adalah 23,7 trilyun kaki kubik dan diantaranya sebesar 14,4 trilyun kaki kubik telah disertifikasi sebagai cadangan terbukti.

Sehingga pada 2008 lalu, AS sudah memroyeksikan bahwa melalui LNG Tangguh, Indonesia akan menjadi pemasok langsung energi bagi kawasan pantai barat Amerika.

Belum lagi termasuk di sektor minyak dan gas, di mana kerjasama Indonesia-AS sudah terjalin cukup erat, yang ditandai dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan minyak dan tambang besar seperti ExxonMobile, Chevron, Conoco Phillips, Freeport McMoran, Newmont dan lain sebagainya.

Perusahaan Conocco Phillips (gabungan dari perusahaan Conoco, dan Phillips Petroleum Company) telah beroperasi di Indonesia selama 41 tahun. Di wilayah Papua, mereka mengoperasikan Blok B, Tobong dan bagian Selatan Sokang.

Pada 1998 antara perusahaan pembangunan serta konstruksi milik Pertamina dan Sembawang mencapai kesepakatan dengan Conoco untuk menjual 325 juta kubik gas alam per hari melalui pipa ke Singapura.

Melalui kerjasama dengan BP

MIGAS, Conoco juga membangun pertambangan minyak di pinggir pantai Belida dan pertambangan gas alam Blok B di wilayah pedalaman Papua. Sementara perusahaan Global Santa Fe yang juga milik Amerika mengoperasikan tambang minyak di daerah Klamone di Papua.

British Petroleum, yang merupakan perusahaan minyak milik Inggris yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan minyak milik AS seperti Standard Oil of Indiana dan Standard Oil of Ohio serta Atlantic Richfield Company (Arco) maupun Amoco, melakukan pengeboran gas alam cair di kawasan lepas pantai (offshore) dan daratan (onshore) bekerjasama dengan BP Migas., di sekitar kawasan Teluk Bintuni.

Meskipun belakangan proyek tersebut dibatalkan gara-gara protes 7 suku besar di sekitar wilayah Bintuni (Suku Iratotu, Wamesa, Sebiar, Simori, Kuri, Soub dan Moskona). Dengan alasan mengancam ribuan hektar hutan rawa di Teluk Berau.

Selama kekayaan alam Papua masih ada, AS akan berusaha menekan pemerintah Indonesia agar penjajahan ekonomi bisa terus berlangsung. Baik melalui Freeport maupun perusahaan-perusahaan asing lainnya, akan menysasar proyek eksplorasi minyak bumi di Papua Barat, terutama di Daerah Kepala Burung.

Maka, rasanya sudah saatnya pemerintah Indonesia bertindak tegas, untuk tidak melanjutkan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia yang akan segera berakhir pada 2021 mendatang.

Kedua, segera menasionalisasikan aset PT Freeport dengan menyerahkannya kepada BUMN yang dipandang cukup berkompeten. *o Hendrajit*

# Freeport, Nasionalisme, dan Nasionalisasi

Diskusi tentang masa depan PT Freeport Indonesia hampir selalu dikaitkan dengan nasionalisme, yang berujung pada keinginan untuk menasionalisasi perusahaan tambang tersebut. Tetapi kalangan internal istana tidak satu suara soal gagasan nasionalisasi itu.



**D**ara *founding fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia punya semangat nasionalisme menggebu. Mereka tampaknya lebih suka

jika sumber daya alam Indonesia ditenggelamkan saja ke laut daripada dieksploitasi oleh kolonial Belanda. Kalau toh harus menunggu, mereka siap menunggu sekian tahun sampai para insinyur Indonesia sendiri sanggup menggantinya, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Semangat nasionalisme ini tidak sirna sampai sekarang. Heboh tentang tuduhan permintaan saham oleh Ketua DPR-RI Setya Novanto

*Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan mengenai pencatutan nama Presiden oleh politisi DPR di Jakarta, Rabu (18/11).*

ke petinggi perusahaan emas PT Freeport Indonesia, telah mengangkat lagi isu nasionalisme tersebut. Isu itu diterjemahkan dalam bentuk nasionalisasi Freeport.

Pada 2013, terjadi kecelakaan kerja berupa robohnya terowongan di lokasi penambangan PT Freeport, yang menewaskan 28 orang pekerja serta 10 pekerja lainnya luka-luka. Sesudah peristiwa itu, sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI meminta pemerintah menghentikan sementara kegiatan PT Freeport yang melakukan penambangan di Papua, untuk kemudian diubah

menjadi perusahaan nasional.

"Kegiatan PT Freeport ibarat negara dalam negara di Indonesia. Sudah saatnya PT Freeport dievaluasi dan sahamnya dinasionalisasikan," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, waktu itu. Saat itu pemerintah masih di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

CNN Indonesia belum lama ini membuat survei di lamannya, dengan menanyakan, bagaimana respons masyarakat Indonesia atas kelanjutan Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia, yang telah beroperasi di Papua selama kurang lebih 48 tahun? Jawabannya signifikan: 90 persen masyarakat menghendaki nasionalisasi Freeport. Survei ini dilakukan di media daring, dan mungkin belum layak disebut survei akademis. Namun, hasil survei ini mungkin cukup untuk menggambarkan sentimen masyarakat Indonesia pengguna Internet, tentang harapan mereka pada masa depan Freeport.

Dari kalangan pelaku usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendesak Pemerintah Jokowi agar segera menasionalisasi PT Freeport Indonesia, ketimbang memperpanjang kontrak perusahaan tersebut. "Pemerintah jangan hanya puas dengan 1 persen (royalti) itu saja. Harus bisa maksimal sesuai perundang-undangan," kata Ketua Komite Tetap Bidang UKM Kadin Indonesia, Alawi Mahmud, 19 Oktober 2015.

Alawi mengatakan, pemerintah perlu meninjau ulang keberadaan PT Freeport, yang hingga kini tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Indonesia. "Keberadaan Freeport harus di tinjau lagi. Harus dengan catatan, catatan itu yang harus mengakomodir Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

## Rekomendasi untuk Presiden

Suara pendukung nasionalisasi bahkan santer dari lingkungan dalam istana sendiri. Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, pernah merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar PT Freeport Indonesia dinasionalisasi setelah kontraknya habis pada 2021. Luhut menyatakan pandangan pribadinya, bahwa nasionalisasi Freeport sebaiknya dilakukan seperti ketika negara menunjuk PT Pertamina (Persero) mengambil alih wilayah kerja minyak dan gas di Blok Mahakam.

KK PT Freeport Indonesia akan habis pada 2021. Namun manajemen meminta diberikan perpanjangan kontrak dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus lebih cepat. Alasannya, Freeport ingin menanamkan investasi 18 miliar dollar AS untuk proyek tambang bawah tanah yang akan digarapnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, menyatakan, manajemen perusahaan asal AS itu harus melakukan divestasi 10,64 persen sahamnya tahun 2015 ini, sehingga menggenapi jumlah saham perusahaan yang dipegang pemerintah menjadi 20 persen. Proses divestasi kemudian berlanjut pada 2019, di mana Freeport harus menawarkan lagi 10 persen sahamnya ke Indonesia.

Namun, belum juga muncul kejelasan tentang nasib divestasi tersebut. Heriyanto, Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Minerba di Kementerian ESDM menyatakan, manajemen Freeport meminta divestasi dilakukan melalui penjualan saham ke



publik di pasar modal atau penawaran umum saham perdana (*initial public offering/IPO*) sebesar 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pada 18 November 2015 mengancam, jika Freeport tidak memenuhi kewajiban divestasi dan empat syarat lain yang diminta Presiden Jokowi, maka kontraknya tidak akan diperpanjang.

Sesuai komitmen, Freeport harus mematuhi sejumlah persyaratan yang diajukan Presiden Jokowi, jika ingin melanjutkan bisnis tambangnya di Indonesia pasca-kontrak habis pada 2021. Persyaratan itu adalah membayar royalti, membangun pabrik pemurnian (*smelter*), memanfaatkan sumber daya lokal (*local content*), melepas sebagian sahamnya (*divestasi*) ke pemerintah atau badan usaha nasional, serta melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar.

## Reaksi Pemerintah AS

Lantas bagaimana dengan kemungkinan reaksi pemerintah AS? Menurut Luhut, kelanjutan kontrak karya Freeport adalah urusan bisnis, yang tidak terkait dengan hubungan bilateral Indonesia-AS. Maka, sikap apapun yang diambil pemerintah adalah hak Indonesia sebagai negara berdaulat.

"Tidak ada urusan dengan AS. *This is b to b (business to business)*. Kalau dia tidak *deliver*, masak diteruskan," tutur Luhut. Ditambahkannya, masalah bisa muncul jika Indonesia menghambat Freeport. Tapi dalam kasus ini, justru Freeport yang tidak melakukan komitmen.

Menurut "skenario nasionalisasi Luhut," Freeport mungkin bisa meniru kasus Blok Mahakam. Dalam kasus Blok Mahakam yang habis masa kontraknya pada 2017, Pertamina diinstruksikan oleh pemerintah untuk menguasai sepenuhnya Blok Mahakam. Namun pada pengelolaannya kelak, BUMN Migas itu dimungkinkan memberikan hak partisipasi (*participating interest*) Blok Mahakam, dengan memprioritaskan (*first right of*

refusal) kepada PT Total E&P Indonesia selaku pemegang hak konsesi saat ini. Langkah itu adalah hak pemerintah.

Dalam kasus PT Freeport, pemerintah juga berhak mengambil alih ketika kontrak karyanya habis pada 2021. Pemerintah dimungkinkan menunjuk PT Antam (Persero) Tbk menjadi pemegang utama tambang mineral Grasberg, untuk kemudian bisa saja *first right of refusal* diberikan kepada Freeport untuk menjadi mitranya.

Harapan boleh saja membubung tinggi. Tetapi para menteri di kabinet Jokowi ternyata tidak satu suara dalam isu nasionalisasi Freeport ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada 2 Juli 2015 mengatakan dengan lugas, upaya nasionalisasi terhadap perusahaan asing sebagai "buah pikiran yang sempit."

Kata Sudirman, Pemerintah tidak berniat mengambil alih saham PT Freeport Indonesia setelah berakhirnya masa kontrak perusahaan itu pada 2021 nanti. "Pikiran sempit untuk mengambil alih. Itu pikiran yang kurang pas di zaman sekarang," kata Sudirman. Pandangan Sudirman sangat kontras dengan pandangan Luhut dan Rizal Ramli.

Dalam perspektif Sudirman, untuk bisa bersaing secara global, Indonesia harus bisa berinteraksi dengan komunitas internasional, maka Indonesia masih membutuhkan perusahaan asing. "Yang membuat kita tangguh itu kalau kita bisa bekerja sama dengan bangsa lain dan berprestasi. Kita memilih untuk tetap dengan pemain global sebagai bagian dari *benchmark*," tegasnya.

Kunci jawaban atas isu nasionalisasi Freeport ini ada di tangan Presiden Jokowi. Jokowi pastinya sadar, nasionalisasi Freeport adalah isu yang populer, tetapi sekaligus sarat dengan tarik-menarik berbagai kepentingan. Jokowi belum bicara tegas soal nasionalisasi Freeport. Tampaknya ia memilih "menunggu momen yang tepat" untuk mengatakannya. Tetapi permainan tunggu-menunggu ini tak bisa terus diulur-ulur. Satrio Arismunandar

# Nasionalisasi Freeport

Oleh : Salamuddin Daeng

[Peneliti Asosisai Ekonomi Politik Indonesia – Jakarta]



Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9).

## Latar Belakang

Perusahaan tambang Freeport adalah penyakit kanker bagi kedaulatan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya merusak mentalitas pejabat Indonesia yang selalu bersedia menjadi kacung Freeport, namun lebih jauh Freeport tampaknya menolak taat kepada peraturan perundangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terbukti segala macam cara ilegal dilakukan oleh perusahaan ini untuk mempertahankan cengkeramannya atas kekayaan alam negeri ini. Bahkan perusahaan terbukti melakukan sogok, suap kepada pejabat Indonesia, padahal hal itu merupakan praktik

yang sangat tercela secara moral terkait *good corporate governance* sebuah perusahaan multinasional. Tapi mengapa hal itu menjadi lazim di Indonesia?

Padahal Indonesia adalah negara merdeka yang harus dihormati oleh dunia dan juga perusahaan multinasional. Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi nasionalisme dan kemanusiaan. UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar Indonesia mengamatkan agar kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun ideologi dan konstitusi selalu dipertukarkan secara murah oleh

pemerintah yang menempatkan dirinya sebagai subsistem dari korporasi multinasional.

Kasus perusahaan tambang terbesar di Indonesia Freeport dan yang terkaya di dunia saat ini, adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kedaulatan suatu bangsa dicampakkan oleh sebuah perusahaan swasta. Kasus ini merupakan ujian paling besar apakah Indonesia sanggup mewujudkan kemerdekaannya atas segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kesemuanya akan ditentukan seberapa baik proses negosiasi dan seberapa tangguh elite pemerintahan dalam menempatkan

kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

### Siapa Freeport?

Siapa perusahaan Freeport yang berhasil mengacak-acak kedaulatan Indonesia? Pada mulanya, Freeport McMoRan didirikan pada 1912 untuk menambang belerang (sulphur) di Amerika Serikat untuk penjualan di Italia. Untuk melebarkan sayap bisnis, didirikan berbagai anak perusahaan di bidang pembangunan kota, terminal kereta api, tambang aspal, belerang, minyak, mangan. Sementara Freeport Indonesia didirikan pada tahun 1966, memperoleh kontrak karya pertama tahun 1967.

Pada tingkat global perusahaan ini beroperasi dengan total aset di seluruh dunia senilai \$ 58,795 juta dolar. Dikalikan dengan kurs Indonesia sekarang maka aset perusahaan kira-kira mencapai Rp 700 triliun. Hampir setara dengan aset Pertamina tahun 2014 yakni senilai \$ 50,3 million. Jadi sebenarnya perusahaan Freeport ini tidak kaya-kaya amat. Sementara Pemerintah selalu memanjakan Freeport dan sisi lain Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia selalu dianaktrikan oleh pemerintah.

Di dunia, Freeport Corp. adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya alam seperti *Copper* (Cu), *Gold* (Au), *Molybdenum* (Mo), *Cobalt* (Co) termasuk *Oil* dan *Natural Gas*. Perusahaan asal Amerika Serikat ini adalah perusahaan raksasa multinasional yang beroperasi di berbagai negara seperti Amerika

Serikat, Mexoco. Peru, Chili, Congo dan Indonesia.

Tahun 2014 Freeport mencetak penjualan senilai \$ 21,438, meningkat dari \$ 20,921 tahun sebelumnya. Namun perusahaan ini memiliki utang senilai \$ 18,970, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya senilai \$ 20,706. Akibatnya perusahaan ini tahun 2014 mengalami kerugian senilai (1,308) tahun sebelumnya perusahaan mencetak keuntungan \$ 2,658, tahun-tahun ke depan perusahaan ini akan terus dibayang-bayangi kerugian akibat menurunnya harga komoditas global.

Pertambangan di Indonesia mengontribusikan cadangan tembaga sebesar 29.0 billion lbs atau sebesar 28 % persen dari total cadangan tembaga Freeport sebesar 103.5 billion lbs di seluruh dunia. Namun Indonesia mengontribusikan cadangan emas sebesar Au 28.2 million ozs atau mencapai 98.9% persen dari cadangan emas Freeport di seluruh dunia sebesar Au 28.5 million ozs. Dengan demikian tepat kalau dikatakan bahwa pertambangan Indonesia adalah pertambangan emas bagi Freeport.

Demikian pula halnya dalam hal penjualan emas global Freeport, Indonesia mengontribusikan sebesar 1.17 million ozs emas dari total penjualan emas Freeport sebesar 1.25 ozs emas. Dengan demikian Indonesia mengontribusikan sebesar 93.6 % penjualan emas Freeport. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Freeport Indonesia adalah tambang tembaga bagi Freeport adalah keliru. Indonesia adalah

pertambangan emas terbesar bagi perusahaan asal negeri paman Sam ini.

Hingga saat ini PT Freeport Indonesia belum secara terbuka menyatakan dirinya sebagai pertambangan emas. Meskipun pendapatan terbesarnya berasal dari penjualan emas. Hal ini patut diduga sebagai upaya memanipulasi besaran nilai royalti dan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Belum lagi data produksi emas Indonesia sangat sulit diverifikasi kebenarannya. Mengingat pemurnian konsentrat tidak berlangsung di Indonesia. Pemerintah hanya mendapatkan laporan dari perusahaan mengenai besaran produksi dan penjualannya, namun tidak dapat melihat secara langsung.

Itulah mengapa dalam konteks Indonesia isu Freeport adalah kontroversi sebuah pertambangan emas paling terkemuka di dunia. Mengingat perusahaan ini merupakan pertambangan raksasa terbesar dan terkaya di dunia. Itulah mengapa perdebatan tentang Freeport selalu menjadi isu utama baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat sendiri.

### Kontrak Freeport

Publik nasional mengasosiasikan Freeport sebagai manifestasi dari kolonialisme di Indonesia. salah satu ciri utamanya adalah luas lahan yang dikuasai secara eksklusif oleh Freeport yang sangat luas dan tidak ada satu pihakpun dari Indonesia yang dapat menyentuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Freeport adalah perusahaan yang memperoleh Kontrak Karya

## Komposisi Cadangan dan Penjadwalan Tembaga dan Emas Freeport Corp Tahun 31/12/2014.

Keterangan	Indonesia	Internasional	%
Reserves	Cu 29.0 billion lbs	103.5 billion lbs	28 %
	Au 28.2 million ozs	28.5 million ozs	98,9 %
Sales	Cu 0.66 billion lbs	3.89 billion lbs	17 %
	Au 1.17 million ozs	1.25 million ozs	93,6 %



Aktivis dari Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Freeport, Plaza 89 Kuningan, Jakarta, Rabu (26/11).

(KK) generasi I dari pemerintah Indonesia tahun 1967. Perusahaan ini memperoleh konsesi penguasaan lahan yang mengandung deposit emas dan tembaga di Papua seluas 1 juta hektar. Pemberian kontrak karya kepada Freeport diwarnai dengan kontroversi. Banyak fakta menyebutkan bahwa konsesi kontrak karya ini sebagai imbalan jasa atas dukungan AS dalam mengembalikan Papua ke Pangkuan Republik Indonesia.

Dalam buku sejarah dunia *Tragedy and Hope, A History of the World in Our Time* yang ditulis Carroll Quigley yang diterbitkan Macmillan Company 1966, ditulis "Controversy and intermittent fighting between Indonesia and the Dutch over western New Guinea continued until 1962, when American pressure persuaded the Netherlands to yield, but left Indonesia, led by Achmed Sukarno, unfriendly to the West." Atas jasa inilah perusahaan asal AS ini kemudian mendapatkan konsesi menambang tembaga dan emas di Papua.

Namun balas jasa ini seolah tak mengenal akhir. Pemerintah selanjutnya perusahaan Freeport

memperoleh perpanjangan kontrak tahun 1991 sehingga luas kontrak karya mencapai 2,6 juta hektar. Penguasaan lahan dalam skala yang sangat luas oleh Freeport tersebut menyebabkan banyak pihak menyebut Freeport sebagai kolonialisme baru di Indonesia karena menguasai 1/10 wilayah Papua.

Data dari perusahaan Freeport menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia (PT-FI) dibawah kontrak karya (*Contract of Work*) tengah melakukan eksplorasi dan produksi diatas lahan 24,700 hektar di Blok A area. Selain itu dibawah kontrak karya lainnya PT-FI juga sedang melakukan aktifitas eksplorasi di Blok B area yang mencakup lahan 502,000 hektar. Penguasaan tersebut adalah penguasaan penuh atas sebagian lahan kontrak karya yang dilepaskan. Namun sewaktu-waktu lahan konsesi kontrak karya tersebut dapat diambil kembali.

Setelah pertambangan Ertsberg dilahap habis oleh Freeport, dikatakan pula bahwa saat ini mereka memiliki tiga lokasi tambang yakni Grasberg yang merupakan tambang terbuka yang ditemukan pada tahun 1988, Deep Ore Zone yakni pertambangan *underground mine* dan Big Gossan yang juga *underground mine*.

Dalam tahun 2015 ini Perusahaan Freeport mengharapkan penjualan

dari tambang Indonesia untuk mendekati 1 miliar pon tembaga atau senilai Rp. 40,9 Triliun dan 1,3 juta ons emas atau senilai Rp. 21,72 Triliun. Sehingga nilai penjualan Freeport atas tambang Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 62,66 Triliun. Jika 38% dari nilai produksi adalah biaya sebagaimana yang disebutkan perusahaan maka keuntungan perusahaan adalah sebesar Rp. 38.59 triliun.

### Momentum Renegosiasi

Keuntungan yang cukup besar yang diperoleh Freeport dari pertumbuhannya di Indonesia sangatlah kecil. Selain karena royalti perusahaan yang sangat kecil dan tidak dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Papua, perusahaan tidak mau menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam kontrak karya itu sendiri dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dan Freeport adalah kewajiban melakukan divestasi saham. Perusahaan seharusnya telah mendivestasikan 51 % saham kepada Indonesia (pemerintah dan/atau BUMN). Namun sampai dengan saat ini perusahaan enggan menjalankannya.

Faktanya perusahaan sendiri menyebutkan bahwa kepemilikan Freeport Internasional atas tambang dan papua adalah: 90.64% (termasuk 9.36% yang dimiliki melalui anak perusahaannya yakni PT Indocopper Investama); dan 9.36% yang dimiliki pemerintah Indonesia. Kegagalan dalam divestasi seharusnya menimbulkan konsekuensi diakhirinya kontrak karya, karena itu merupakan pelanggaran.

Kewajiban lainnya yang tidak dijalankan oleh Freeport adalah kewajiban untuk melakukan hilirisasi atau pemurnian di dalam negeri sebagaimana diatur dalam



Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11).

Freeport ditengarai akibat ulah kementerian ESDM sebagai otoritas berwenang yang memberi angin segar kepada Freeport baik dalam bentuk melanjutkan perpanjangan ijin ekspor konsentrat tembaga dan emas dan angin segar perpanjangan kontrak. Dalam surat yang dilayangkan Sudirman Said menteri ESDM kepada Freeport beberapa waktu lalu mengindikasikan keinginan menteri ESDM untuk memperpanjang kontrak Freeport. Selain itu menteri ESDM juga telah memberikan ijin resmi kepada Freeport untuk melanjutkan ekspor konsentrat. Dengan demikian maka kedua belah pihak baik Pemerintah dalam hal ini menteri ESDM dan pihak Freeport sendiri telah secara langsung mengingkari UU Minerba.

Mestinya Freeport sendiri menunjukkan itikad baik dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana kontrak karya dan pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh menjalankan UU minerba. Karena keduanya merupakan *track* menuju nasionalisasi tambang Freeport di Papua dimana tambang ini bisa dikuasai secara mayoritas oleh negara dan ditambah dengan meningkatnya nilai tambah ekonomi atas pertambangan karena adanya industrialisasi. Itulah cara paling sederhana dalam melakukan nasionalisasi Freeport.

Ingat Indonesia masih menysakan aset dalam bentuk kekayaan tambang yang saat ini dikuasai Freeport yang menurut data perusahaan menysakan cadangan masih 34 miliar pon tembaga dan emasnya 35,5 juta ons atau sedikitnya bernilai Rp 1985 triliun. Nilai itulah yang seharusnya menjadi partisipasi Indonesia dalam kepemilikan saham di Freeport, bukan membelinya dengan APBN. Semoga dimengerti. ◦

UU Minerba. Batas waktu yang ditetapkan oleh UU bagi Freeport untuk membangun *smelter* adalah 1 Januari 2014. Namun hingga hari ini perusahaan belum ada tanda-tanda akan melakukan investasi membangun pabrik pemurnian. Dengan demikian maka kegagalan ini seharusnya menimbulkan konsekuensi sama yakni diakhirinya kontrak.

Anehnya dalam website resmi Freeport disebutkan bahwa “PT

*Freeport Indonesia and the Government of Indonesia Agree on Continuation of Operations of the Grasberg Mining Complex beyond 2021*” (10/08/2015). Padahal proses di dalam negeri sama sekali belum selesai dan bahkan perusahaan ini tengah berhadapan dengan kontroversi dalam proses divestasi saham yang belum tuntas sampai dengan hari ini.

Tidak diakhirinya kontrak karya

**S**udah tiga kali pemerintah Indonesia memperpanjang kontrak dengan Freeport sejak mantan Presiden Soeharto menandatangani kontrak karya dengan Freeport pada tahun 1967.

Kontrak pertama Indonesia-Freeport dilakukan ketika kondisi Indonesia lagi membenahi sistem ke-tatanegaraannya. “UU no tahun 1967 terjadi ditengah situasi ketatanegaraan yang pada waktu itu, pemerintah dan MPR sedang melakukan penataan kelembagaan. Dan Freeport pun masuk pada waktu itu juga,” kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis beberapa waktu lalu.

Dalam kontrak saat itu, Soeharto menempatkan Indonesia sebagai subjek hukum perdata. Oleh karena itu maka terminologi kerjasama dengan Freeport adalah kontrak. “Perusahaan dan pemerintah itu adalah sama (sejajar). Karena itu bicara mengenai negoisasi,” kata Margarito.

Namun, sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sebenarnya sudah tidak ada ruang lagi untuk negoisasi. Pemerintah tidak sejajar lagi dengan perusahaan (Freeport).

“Undang-undang sudah berubah. Izin sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Konsekuensinya, tidak ada renegotiasi. Yang ada adalah kalau tidak ada izin tidak ada negoisasi,” tegasnya.

Hakikat UU No 4 tahun 2009 adalah istilah Kontrak Karya sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah izin melakukan pertambangan yakni Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sejalan dengan Margarito, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof Romli Atmasasmita tegas mengatakan bahwa operasi Freeport dengan berpegang pada Kontrak Karya adalah pelanggaran hukum. “PT Freeport tidak mengubah dari Kontrak Karya ke IUPK sudah pelanggaran,” kata Romli ketika berbincang dengan Aktual.com.

Akan halnya pakar hukum



## Langgar Hukum, Mengapa Freeport Dipertahankan?

internasional, Hikmahanto Juwana. Dia mengingatkan pemerintah bahwa IUPK juga harus tunduk dan sesuai UU Minerba. “IUPK boleh untuk ganti Kontrak Karya asal sesuai aturan. Mengingat UU Minerba pakai izin bukan lagi kontrak,” kata Hikmahanto ketika dihubungi Aktual beberapa saat lalu.

### Kontrak Karya versi ESDM

Ada hal menarik yang sudah dilakukan Kementerian ESDM soal Kontrak Karya Freeport.

Seperti yang tercantum didalam surat Sudirman Said dengan



Margarito



(Foto atas) Said Didu

(Foto kiri) Pekerja tambang berjalan di sebuah tambang bawah tanah (underground mine) milik PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Mimika, Timika, Papua, Sabtu (14/2).

Chairman of the Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet. Pada surat itu, Sudirman Said menjamin perpanjangan kontrak bagi Freeport.

Sudirman Said juga diduga melegalkan perbuatan melanggar UU Minerba yang dilakukan PT Freeport soal pembangunan hasil pengolahan tambang (smelter), dengan meneruskan Permen ESDM No 1 tahun 2014.

Padahal menurut Romli, di dalam UU Minerba pasal 170 jelas disebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib membangun *smelter* sejak 5 tahun setelah UU Minerba diterbitkan, atau pada tahun 2009.

Pada pasal 170 UU itu juga dijelaskan bahwa pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. "Tidak bangun smelter pelanggaran juga," tegas Romli.

Staf khusus Menteri ESDM, Said Didu dalam sebuah perbincangan diskusi di sebuah televisi nasional menyatakan Permen yang melegalkan PT Freeport melanggar UU Minerba tidak ada atau belum ditulis soal sanksi. "Dibaca detail UU dilarang, tapi tidak ada sanksi," kata dia.

Pernyataan Said Didu ini dibantah keras oleh Margarito Kamis. Memang dalam UU Minerba tidak dituliskan soal sanksi, namun sesuai dengan hukum tatanegara itu salah. "Secara prinsip administrasi negara, kalau syaratnya tidak terpenuhi atau kalau ada pelanggaran terhadap UU itu, tindakan hukum itu berdiri dengan sendirinya tidak sah," kata Margarito.

Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan, mengambil tindakan hukum untuk memutuskan kontrak. "Konsekuensi nanti diperkarakan itu lain soal. Begitu konsekuensi konstitusional," kata dia.

Sekadar informasi, pada 29 Juli

2015, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga sebesar 775.000 ton untuk enam bulan ke depan kepada Freeport.

### KPK akan Masuk di kasus Freeport?

Izin ekspor ke Freeport kini menambah deretan panjang dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Kementerian ESDM di kasus Freeport dengan Freeport.

Menurut pengamat energi Yusri Usman jika pemerintah oknum-oknum di Kementerian ESDM memikirkan kepentingan bangsa dan negara jelas izin ekspor Freeport itu tidak akan dikeluarkan.

Yusri melihat, dengan melakukan pemurnian konsentrat di smelter maka pemerintah bisa tahu konsentrat apa saja yang telah diangkat oleh Freeport dari perut bumi Papua. Dari situ akan ketahuan berapa jumlah nominal dari hasil pemurnian itu yang akan diterima negara.

Ini bisa dijadikan lembaga hukum untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Freeport. "Kita harus menekan, bagaimana komitmen Freeport terhadap UU Minerba. Bila perlu izin konsentrat itu kita gugat ke PTUN," tegas Yusri, beberapa waktu lalu.

Dan KPK juga sudah lama mengendus dugaan korupsi di Freeport. Saat ini Taufiequrrachman Ruki Cs akan membuat sebuah kajian khusus untuk kasus korupsi Freeport.

"Kalau secara umum itu (Freeport) kan hal yang strategis. Tentu harus menjadi perhatian. Iya KPK termasuk di dalam kegiatan yang jadi perhatian," jelas Zulkarnain, di Bogor, Jawa Barat, Senin 23 November 2015.

Terutama dalam menjawab pertanyaan ini: mengapa Freeport 'enggan' menyelesaikan pembangunan smelter. Dan mengapa Menteri ESDM dianggap menabrak UU Minerba? ◦

Nebby Mahbubirrahman-Mochammad Zaky Kusumo

## Kontrak Karya Freeport Jadi IUPK, Otomatis Kontrak Diperpanjang

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengingatkan perubahan skema operasi kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan merevisi Undang-undang (UU) Mineral dan batu Bara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 jangan hanya dilakukan untuk satu kepentingan.

Perubahan IUPK disarankan tak dilakukan saat ini karena justru bisa memperpanjang masa izin Freeport di Indonesia. Menurut Hikmahanto, sebaiknya perubahan skema dilakukan saat kontrak karya berakhir.

“IUPK boleh untuk ganti KK asal sesuai aturan mengingat UU Minerba pakai izin bukan lagi kontrak. Tapi perubaham saat kontrak sudah berakhir,” kata Hikhanto, Rabu (25/11).

Pasalnya, jika izin tersebut diberlakukan setelah merevisi Undang-undang UU Minerba maka sesuai Pasal 83 huruf (g) UU Minerba justru akan memperpanjang kontrak Freeport.

“Asal jangan saat ini langsung diubah ke IUPK karena IUPK bisa memberikan 20 tahun. Artinya kalau

2015 diubah maka Freeport baru selesai 2035 bukan 2021,” lanjutnya.

Lebih jauh Hikmahanto menegaskan, bawah revisi UU Minerba sebaiknya dilakukan tidak atas dasar suatu kepentingan belaka, namun juga berdasarkan realita yang tidak sesuai.

“Kalau mau direvisi itu harus dilihat pasal mana yang harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan realita. Tapi jangan revisi untuk memenuhi suatu kepentingan,” jelasnya.

Disinggung mengenai kemungkinan dilakukannya gugatan oleh Freeport yang bersikeras meminta perpanjangan kontrak, Hikmahanto meyakinkan pemerintah tak perlu khawatir karena tidak ada yang dilanggar.

“Freeport bisa saja meminta. Tapi pemerintah kan tidak harus menyetujui,” ujarnya.

Pun demikian dengan penggantian kontrak kerja dengan IUPK, Hikmahanto memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini menepis kekhawatiran digugatny pemerintah Indonesia melalui Arbitrase internaional. “Iya gak ada (pemerintah) digugat arbitrase saat penggantian KK dengan IUPK,” tuntasnya. /Arbie Marwan-Fadlan Syjam Butho

## KPK: Sadapan Sudirman Said Ilegal

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji menegaskan, bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum

Demikian disampaikan Indriyanto, menanggapi tindakan Menteri ESDM Surdirman Said yang menyadap pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport Indonesia.

“Secara umum, melakukan penyadapan adalah tindakan ilegal bila dilakukan oleh siapapun yang tidak miliki wewenang,” kata Indriyanto, saat



dihubungi, Kamis (26/11).

Menanggapi tindakan Sudirman Said lebih jauh, Indriyanto menyerahkannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyelesaikan tugasnya. “Biarkan saja MKD selesaikan tugasnya,” kata dia.

Terhadap yang dilakukan Sudirman Said, banyak pihak yang berasumsi bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang ilegal dan bisa dikatakan sebagai bentuk ‘hate speech’. Pasalnya, masyarakat bisa dikatakan telah hilang kepercayaan lantaran sadapan yang belum tentu kebenarannya. /Nebby-M. Zhacky Kusumo

## Izin Ekspor Freeport Bisa Digugat ke PTUN

Kementerian ESDM telah memberikan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga sebesar 775.000 ton untuk enam bulan ke depan kepada PT Freeport Indonesia. Rekomendasi berupa surat persetujuan ekspor (SPE) itu diberikan keluaran pada 29 Juli 2015 lalu.

Pemberian SPE itu justru dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pengamat kebijakan energi, Yusri Usman menyebut kebijakan Menteri ESDM Sudirman Said bisa digugat lantaran dianggap menabrak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

“Kita harus menekan bagaimana komitmen Freeport terhadap UU Minerba. Bila perlu izin konsentrat itu kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegas Yusri, saat dihubungi, Kamis (26/11).

Menurut dia, seharusnya pemerintah jangan dulu memberikan izin ekspor untuk Freeport sebelum mereka menuntaskan berbagai kewajibannya, salah satunya yakni membangun pengolahan hasil tambang atau smelter.

Dengan adanya smelter tersebut, pemerintah bisa mengetahui sumber daya alam apa saja yang dibawa Freeport. “Kita akan tahu mineral-mineral berharga apa saja yang dihasilkan smelter itu. Tau kita nanti mineral apa yang diambil Freeport,” paparnya.

Aturan hukum mengenai pembangunan smelter itu, tertuang dalam UU Minerba Pasal 170. Peraturan itu menyebutkan bahwa pemegang kontrak pertambangan, dalam hal ini Freeport, yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian. Nah proses pemurnian itu dilakukan oleh smelter.

Dengan demikian, lanjut Yusri, pemberian SPE ini jelas telah menabrak UU Minerba. Pasalnya, hingga kini smelter yang dijanjikan oleh Freeport belum juga berdiri.

/Nebby-M. Zhacky Kusumo



**Tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian saham Garuda, Muhammad Nazaruddin tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/11).**

perusahaan Nazaruddin memborong saham milik PT Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar pada 2010.

Pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia itu dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup. Kelima perusahaan itu di antaranya, PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology Utama, PT Cakrawala Abadi, PT

Darmakusumah, dan PT Pacific Putra Metropolitan.

Khusus untuk PT Exartech, Nazaruddin menggunakan perusahaan itu untuk meraup keuntungan dalam proyek pengadaan fasilitas, riset terpadu dan alih teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2008-2010.

Dalam proyek pendirian pabrik vaksin, PT Exartech berhasil memenangkan lelang pengerjaan pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan *chicken breeding* dengan nilai proyek sebesar Rp1 96.541.029.300.

KPK pun sudah menyita berbagai aset milik Nazaruddin, yang diduga merupakan hasil pencucian uang. Wakil Ketua KPK non-aktif, Bambang Widjojanto pada 16 Juni 2013 silam, secara percaya diri mengatakan, jika pihaknya telah menyita seluruh aset milik Nazaruddin. Sedikitnya sudah hampir Rp 400 miliar, aset milik Nazar yang disita KPK, yang di antaranya yakni saham PT Garuda senilai Rp 300 miliar dan kebun kelapa sawit di Riau senilai Rp 90 miliar. /Wisnu-M. Zhacky Kusumo

## Desember Nazaruddin Duduk di Kursi Pesakitan

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas penuntutan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan pelimpahan berkas tersebut, tak lama lagi Nazaruddin selaku tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang akan segera disidangkan.

“Sudah dilimpahkan. Persidangannya sekitar Desember. Jadi sudah dilimpahkan ke pengadilan,” ujar kuasa hukum Nazaruddin, Elsa Syarif di gedung KPK, Rabu (25/11).

Dalam kesempatan yang sama, Elsa juga mengatakan jika dirinya dengan Nazaruddin akan segera mengatur strategi untuk menghadapi persidangan yang tidak lama lagi akan digelar. Dia pun mengaku belum menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

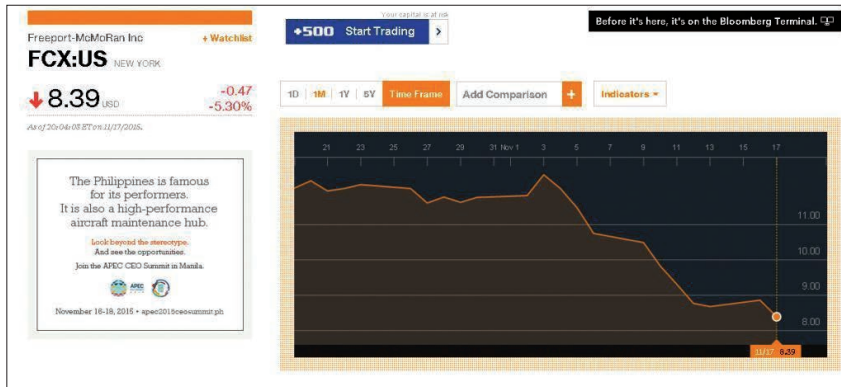
“Kita konsultasi tentang persiapan persidangan. Saya belum konsultasi, baru hari ini. Belum dapat (surat dakwaan),” ujar dia.

Menurut Elsa, Nazaruddin saat ini tengah memantapkan mentalnya. Pada dasarnya, sambung dia, bos Permai Grup itu sudah siap menjalani persidangan. “Siap. Pak Nazar sudah siap. Biar cepat selesai lah biar ada kepastian hukum,” kata dia.

Nazaruddin ditetapkan menjadi tersangka pencucian uang pada 13 Februari 2012. Puluhan saksi telah dipanggil dan aset-aset milik suami daei Neneng Sri Wahyuni telah disita penyidik KPK.

Nazaruddin diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia, dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah (PT DGI), sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games 2011.

Indikasi adanya pencucian uang oleh Nazaruddin ini, terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet. Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis saat bersaksi dalam persidangan Nazaruddin mengungkapkan, bahwa pada 2010 Permai Grup,



Pergerakan Saham Freeport  
 McMoRan di Bursa New York

Freeport McMoRan, sehingga pasar merespon negatif.

“Iya itu bisa jadi, masyarakat internasional mengikuti perkembangan isu yang ada Indonesia, sehingga mempengaruhi bursa saham,” ujar Iqbal saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan bahwa selama ini Sudirman Said kerap memberi kemudahan dan keleluasan operasi Freeport Indonesia, di mana salah satunya adalah pemberian izin ekspor. Meskipun dalam ketentuan UU Minerba sudah mengatur soal kewajiban membangun smelter atau pabrik

## Skandal Freeport Indonesia, Penyebab Saham Freeport McMoRan Anjlok

**P**olemik Freeport Indonesia yang menyebabkan kegaduhan antara Legislatif dan Eksekutif terus menjadi buah bibir tidak hanya di Indonesia. Kegaduhan antara Ketua DPR, Setya Novanto dan Menteri ESDM, Sudirman Said yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilanjutkan dengan pelaporan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ternyata juga disorot oleh masyarakat internasional. Saham Freeport McMoRan, induk dari Freeport Indonesia juga terkena dampak dalam sebulan ini terlihat terus mengalami penurunan.

Di Bursa Saham New York, Amerika Serikat, nilai saham Freeport McMoRan (FCX) berdasarkan data Bloomberg pada 3 November 2015 lalu berada di USD12,41/lembar, namun sampai pantauan terakhir 24 November 2015 waktu Amerika, nilai saham Freeport berada pada USD8/lembar.

Begitupun nilai saham Freeport McMoRan di Bursa Saham Frankfurt,

Jerman dalam sebulan terakhir ini juga mengalami penurunan drastis. Berdasarkan data Bloomberg, nilai saham Freeport pada 3 November berada di EUR11,33/lembar namun sampai pantauan terakhir 24 November 2015 waktu Jerman, nilai saham Freeport berada pada EUR7,62/lembar.

Direktur Lingkar Studi Strategis, Iqbal Nusantara menilai bahwa penurunan saham Freeport McMoRan dalam sebulan ini disebabkan skandal yang tengah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia anak usaha dari

Fadli Zon



pemurnian di dalam negeri dan melarang perusahaan tambang melakukan ekspor kecuali setelah dilakukan pemurnian.

“Ini yang patut digaris bawahi bahwa ada pelanggaran terhadap UU Minerba. Ini patut dicatat dan dianggap satu pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan,” kata Fadli dalam acara diskusi di salah satu TV Nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika dan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha pun membenarkan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Sudirman Said tersebut.

Satya mengungkapkan, permasalahan izin untuk ekspor tersebut sudah diingatkan oleh pihaknya kepada Sudirman, namun hal itu seolah tak diindahkan dan justru terus dilanggar oleh Pemerintah.

“Munculnya Permen ESDM No 1 tahun 2014 yang mengizinkan ekspor dari pada material yang belum dimurnikan itu jelas-jelas menyalahi UU. Tapi waktu itu kenapa pelanggaran itu dilakukan, karena menyangkut kondisi ekonomi Indonesia, makanya waktu itu kita usulkan, kalau memang betul-betul itu dibutuhkan, supaya kerangka hukumnya ada, maka bentuklah Perpu. Ini pelanggaran yang betul-betul sudah kita *warning*, dari awal kabinet sudah kita ingatkan. Menteri juga sepakat dan menyadari kalau itu telah terjadi pelanggaran UU. Tapi tidak juga lahir Perpu-nya,” bebernya.

Sementara itu, Kardaya menambahkan, negara Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya harus diutamakan sisi hukumnya karena itu menjadi dasar dari setiap kebijakan.

“Soal dampak-dampaknya nanti dulu. Dasarnya dulu, tidak ada pertimbangan karena begini-begini, maka hukum boleh ditabrak. Memang UU-nya ini mau kita rubah, tapi sebelum dirubah kan tetap harus dijalankan dong. Ini yang jadi permasalahan,” tutup Kardaya. ◦ *Arbie Marwan*

## Wow, Ambil Alih Tambang Freeport Kurs Rupiah Bisa Rp2.000/USD?

**M**enko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menegaskan kepada Freeport Indonesia jika tidak patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan RI silahkan angkat kaki dari Bumi Indonesia dan kembalikan kontrak karya ke Pemerintah.

“Kalau seandainya Freeport ngotot nggak mauenuhi permintaan presiden, silahkan kembalikan kontrak karyanya,” tegas Rizal dalam acara diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Karena kata Rizal, potensi emas yang dimiliki dari lapangan tambang Freeport di Papua sangat besar, sekitar 16 juta ton. Jika itu dimanfaatkan oleh Indonesia maka bisa memperkuat nilai rupiah.

“Cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100.000 kilogram, China hanya beberapa juta kilogram, Freeport cadangan devisanya itu 16 juta kilogram. Bayangkan setengahnya saja kita masukkan ke dalam cadangan devisa BI, rupiah menguat keberapa?” ucapnya.

Rizal menegaskan, jika Indonesia mengambil alih Freeport maka sama dengan mendapatkan ‘durian runtuh’. Bahkan bisa menyulap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) saat ini menjadi

Rp2.000/USD.

“Bisa menguat ke Rp 2.000 per dolar,” ujarnya.

Pernyataan Rizal Ramli terkait cadangan emas di tambang Freeport yang katanya mencapai 16 juta ton mendapat bantahan dari Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu.

“Pernyataan yang mengatakan bahwa emas yang ada di lahan Freeport adalah 16 juta kg perlu dijelaskan. Data resmi tambang di Freeport adalah hasil sertifikasi lembaga internasional yang terpercaya, jadi bukan hasil hitungan dari pengusaha dan hitungan pemerintah,” ujar Said Didu pekan lalu.

Said Didu mengatakan bahwa berdasarkan catatan lembaga sertifikasi internasional yang diterima Kementerian ESDM bahwa cadangan emas di tambang Freeport hanya sekitar 1.800 kg.

“Jadi cadangan emas di Freeport sekitar 1.800 kg bukanlah 16 juta ton, perhitungannya itu berasal dari ore atau bijih batu di sana sekitar 2,2miliar, dari total bijih tersebut mengandung 0,8 gram per ton emas. Itu berdasarkan sertifikasi lembaga internasional yang digunakan dalam rangka mendapatkan pinjaman ke bank, membangun pabrik smelter, dan fasilitas tambang lainnya,” jelas

Said Didu. ◦ *Arbie Marwan*





## Menteri Rini Pastikan Dua BUMN Tertarik Beli Saham Freeport

Menteri BUMN Rini Soemarno, melalui suratnya kepada Kementerian ESDM dan Kemenkeu, mengaku berminat atas kepemilikan saham dari rencana divestasi PT Freeport.

“Kami dari BUMN sebagai badan usaha milik negara, di mana kami memiliki 9,26% dari Freeport menulis surat ke Kementerian ESDM dan Kemenkeu. Kami berminat kalau ada divestasi dari Freeport. Kalau dalam perjanjiannya 10 sekian persen. Karena kalau kita bisa membeli itu, berarti BUMN memiliki 20%. Jadi belum ada kabar lagi,” kata Rini, Sabtu (21/11).

Menurut Rini, Bahana Sekuritas telah dipersiapkan untuk menghitung valuasi dari saham Freeport yang didivestasi.

“Kita memang ada sendiri, tapi valuasi itu harus dari mereka sendiri. Bukan dari kita. Nggak bisa dikira-kira nilainya. Kita dengar dulu yang mau jual berapa harganya. Terus kita lihat, mampu apa nggak segini,” tambahnya.

PT Aneka Tambang Tbk (antam) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (inalum) disiapkan. Inalum akan menggunakan dana kas perusahaan, sementara Antam kemungkinan dari suntikan modal pemerintah. /Karel Stefanus Ratulangi

## Freeport Bikin Gaduh, Saham Freeport Ikut Gaduh

Saham Freeport-McMoran Inc (FCX) di Bursa Efek New York, Amerika Serikat (AS) dalam satu bulan terakhir terjun bebas dari posisi USD11,75 hingga menjadi USD8,3. Berdasarkan data bursa AS, saham Freeport anjlok hingga 29,83 persen pada bulan ini.

Berdasarkan catatan, ada berbagai faktor yang mendorong anjloknya saham Freeport di pasar Global. Kepala Riset NHKSI, Reza Priyambada menilai gaduhnya Freeport di Indonesia menjadi salah satu penyebab anjloknya Saham Freeport di Bursa AS.

“Gaduhnya Freeport di Indonesia berpengaruh terhadap saham Freeport-McMoran di pasar global. Ada namun tidak terlalu signifikan,” ujar Reza di Jakarta, Kamis (26/11).

Selain sentimen dalam negeri tersebut, faktor lain menurunnya saham Freeport karena harga komoditas tambang saat ini sedang mengalami pelemahan. Akibatnya harga saham Freeport terjun bebas. Pasar global ketika menginvestasikan uangnya di Freeport juga memantau sentimen yang ada di Indonesia.

“Investor global tentu melihat sentimen yang ada di Indonesia. Sentimen pergerakan harga komoditas dan sentimen kondisi Freeport yang ada di Indonesia. Mereka memantau apakah operasional Freeport terganggu atau

tidak terkait polemik yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Untuk diketahui, kejatuhan Saham Freeport menyentuh level terendah sejak 1999 ke level USD8 pada 23 November 2015. Sentimen yang ada di Indonesia saat itu adalah dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merebak dan menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam laporan kinerja perusahaan, Freeport-McMoRan pemilik 90,64 persen saham PT Freeport Indonesia mengalami rugi bersih USD8,15 miliar sepanjang Januari-September 2015. Penurunan laba bersih tersebut dikarenakan rendahnya harga komoditas pertambangan serta minyak dan gas bumi (migas).

Kerugian Freeport-McMoRan juga disebabkan oleh berkurangnya jumlah pendapatan perusahaan sebesar 25,43 persen menjadi USD 12,08 miliar. Sementara kuartal III, Freeport mengalami penurunan pendapatan 35,37 persen menjadi USD 3,68 miliar dari periode yang sama di 2014 sebesar USD5,69 miliar.

Akibat beban operasional yang meningkat signifikan sepanjang Juli-September 2015, Freeport-McMoRan mengalami rugi bersih sebesar USD 3,83 miliar dari sebelumnya mencatatkan untung USD 552 juta.

/Ismed Eka



## Kemenperin: Tidak Ada Lagi Pengecualian Freeport dan Newmont Ekspor Konsentrat

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BBPI) Kementerian Perindustrian, Haris Munandar meminta tidak ada lagi pengecualian bagi Freeport dan Newmont untuk ekspor konsentrat.

“Untuk Newmont dan Freeport, UU No 4 tahun 2009 harus diberlakukan, mereka harus membangun smelter, kalau tidak, tidak boleh lagi ekspor,” tegas Haris di Jakarta, Kamis (26/11).

Menurut Haris, undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mana tercantum larangan ekspor konsentrat dan memerintahkan untuk membangun

smelter, seharusnya sudah diberlakukan.

Namun hingga kini ekspor konsentrat terus terjadi, sedangkan pembangunan smelter belum ada progres yang memadai.

Akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang besar secara terus menerus, karena ekspor konsentrat tidak memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Ia mencontohkan, harga nikel jika dijual dalam bentuk mentahnya, hanya bernilai USD30 per ton, akan tetapi jika diolah dan dijual dalam bentuk nikel pig iron, harganya jauh melambung tinggi menjadi USD1300.

“Contohnya seperti nikel, kalau hanya dijual dalam bentuk mentah, hanya USD 30 per ton, tapi kalau dia (nekel) jadi nikel pig iron, harganya menjadi USD1300 jauh kan?, begitu jadi stainless, udah jadi berapa ribu dolar lagi,” tutur Haris.

Selain itu ia juga menyebutkan bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu, yang dibutuhkan adalah ketegasan untuk menjalankan UU tersebut.

Sedangkan dirinya di Kementerian Perindustrian mengaku, terus berupaya mendorong agar Undang-undang mineral dan batubara tersebut, dapat berjalan dengan efektif. /Arbie Marwan-Dadang Sah

## Rizal Ramli Dukung Arifin Bangun Smelter

PT Medco Energi Internasional Tbk mempersiapkan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter dalam rencana pengambilalihan 76 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara di Lapangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menuturkan pembangunan smelter harus dilakukan perusahaan tersebut dalam pengelolaan tambang di NTB itu.

“Kami ingin nilai tambah yang lebih besar dan Pak Arifin menunjukkan rencana untuk membangun smelter, karena itu memang diwajibkan UU Minerba,” katanya di Jakarta, Rabu (25/11).

Menurut dia, meski tidak semua tambang memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun smelter, tetapi perusahaan tambang raksasa seperti Newmont harus bisa membangun fasilitas pemurnian.

Rizal juga meminta perusahaan migas nasional itu untuk mengembangkan wilayah sekitar pertambangan, termasuk melebihi kapasitas listrik untuk penggunaan masyarakat.

“Dia (Arifin) belajar dari



pengalaman di negeri mau bikin elektrifikasi, jadi ngangkut dengan ‘railway’ (jalur rel) sehingga bisa lebih murah. Saya minta dilebihkan listriknya, selain menghemat biaya operasi tapi juga biar masyarakat sekitar dapat listrik,” katanya.

Rizal menjelaskan pengambilalihan saham Newmont oleh Medco diharapkan bisa mendorong pengembangan 10 destinasi wisata baru yang diantaranya adalah Flores dan Labuan Bajo.

“Kami ingin Pak Arifin bangun program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) di sana supaya produk pertanian dan rakyat di situ, jadi ayam, ikan di sana bisa menyuplai tambang dan pengembangan destinasi wisata yang baru,” pungkasnya.

Presiden Direktur Medco Energi Internasional Tbk, Arifin Panigoro saat menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan pihaknya menyiapkan smelter berkapasitas produksi 500.000 ton per hari dengan investasi sekitar 500 juta dolar AS hingga 600 juta dolar AS.

“Sekarang produksi sekitar 400.000 ton, dengan ukuran tembaga karena emasnya di sana tidak banyak, jadi kami bangun kapasitas 500.000 ton,” katanya.

Terkait lokasi, ada dua opsi pembangunan smelter yaitu di Banten atau di lokasi pertambangan tersebut. /Arbie Marwan-Ant



Petugas keamanan bandara Soekarno Hatta dibantu Marinir melakukan patroli di terminal 1 bandara, Tangerang, Banten, Rabu (25/11).

## Menangkal ISIS Pasca Teror Paris

Lewat aksi terornya, ISIS telah merusak nama Islam dan memojokkan kaum Muslim, yang jadi sasaran kebencian dan kecurigaan di seluruh dunia. Langkah menangkal pengaruh ISIS harus lebih serius.

**S**eperti sudah dikhawatirkan, serangan teror di Paris yang menewaskan 132 orang dan diklaim dilakukan oleh ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) meninggalkan banyak masalah. Korban utama yang dirugikan oleh kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam itu bukan warga non-muslim, tetapi justru orang Islam sendiri.

Sejak aksi teroris 13 November di Paris, warga Muslim yang tinggal di Inggris telah mengalami 115 kali serangan rasial. Menurut surat kabar *The Independent* (23 November), terjadi lonjakan kejahatan Islamofobia lebih dari 300 persen. Angka ini melonjak sepekan setelah terjadinya aksi terorisme di Paris. Mayoritas korban kejahatan kebencian di Inggris adalah gadis dan wanita Muslimah berusia 14 hingga 45 tahun yang

mengenakan jilbab. Sedangkan para pelakunya adalah pria kulit putih berusia 15 hingga 35 tahun.

Gara-gara aksi teror ISIS, para pengungsi dari Suriah yang mayoritas Muslim juga terkena getahnya. Para politisi sayap kanan di Amerika Serikat dan Eropa menyerukan penolakan terhadap pengungsi asal Suriah. Mereka beralasan bahwa milisi ISIS akan menjadikan permohonan suaka sebagai kedok, untuk bisa masuk ke negara mereka dan melancarkan serangan.

Karena sikap-sikap diskriminatif itulah, juru bicara PBB Stephane Dujarric pada 23 November menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap pengungsi asal Suriah. "Yang jelas, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, etnis, atau faktor lain apa pun, jika terkait penampungan pengungsi," ujar Dujarric.

### Agama Sebagai Tameng

Ulama Al-Azhar di Cairo, Mesir, menyebutkan bahwa terorisme – seperti yang dilakukan ISIS – hanya menggunakan agama sebagai tameng. Kekerasan sebenarnya tidak ada dalam

ajaran Islam. Terorisme adalah filosofi hidup bagi mereka yang memang berniat untuk mati. Ini lebih pada "penyakit psikologi dan intelektual" dengan menggunakan agama sebagai tameng, ujar Sheikh Ahmed al-Tayeb, Kepala Pusat Pembelajaran Islam al-Azhar pada pertemuan Dewan Tokoh Muslim.

"Sangat tidak adil dan amat bias, ketika mengaitkan kejahatan pembomoran dan perusakan yang terjadi akhir-akhir ini dengan Islam, hanya karena mereka meneriakkan Allahu Akbar ketika melakukan kejahatan," tegas al-Tayeb.

Ancaman ISIS memang sangat serius karena pengaruhnya yang meluas, tidak sebatas di wilayah Irak dan Suriah. Sebagian besar wilayah di dua negara Arab itu sudah dikuasai ISIS. ISIS kini menguasai wilayah yang luasnya kira-kira sama dengan luas negara Yordania, tetangga Irak dan Suriah. Tetapi pengaruh propaganda ISIS bahkan bisa menjangkau Indonesia, Eropa, dan Amerika, berkat kepaiwaan ISIS memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Hasil penelitian yang dilakukan JM Berger dan Jonathon Morgan menunjukkan, dalam dua tahun terakhir penetrasi ISIS di media sosial semakin gencar. Pada kuartal terakhir 2014, setidaknya ada 46.000 akun Twitter yang beroperasi atas nama ISIS. Setiap akun yang terkait ISIS itu rata-rata memiliki 1.000 pengikut. Secara berkala, diduga ISIS menyebarkan lebih dari 100.000 pesan setiap bulan melalui media sosial Facebook dan Twitter.

Ketika pasukan ISIS merebut kota Mosul di Irak utara pada Juni 2014, ISIS terdeteksi aktif menyebarkan 40.000 pesan Twitter setiap hari. Tiga perempat dari akun tersebut menyebarkan pesan dalam bahasa Arab, dan sisanya menggunakan bahasa Inggris.

Sebelumnya manajemen Twitter pernah mencoba membendung arus ISIS ini dengan menutup ribuan akun

yang dicurigai terafiliasi ISIS, tetapi gagal. Begitu ditutup, akun-akun pendukung ISIS itu dengan cepat mengubah diri dan membiakkan diri dengan wujud identitas lain pada media sosial yang sama atau berbeda. Bahkan ISIS menciptakan media sosial sendiri, “Khelafabook,” sebagai wujud perlawanan terhadap kebijakan Facebook dan Twitter.

### Indonesia Darurat Terorisme

Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj pada 24 November menyatakan, Indonesia harus mewaspadai kelompok ekstremis seperti ISIS. Said memperkirakan, sedikitnya ada 800 warga Indonesia telah bergabung dengan ISIS dan mereka didominasi kaum muda. Pemerintah harus menindak tegas kelompok yang menolak patuh pada nilai-nilai Indonesia.

“Kita kedodoran karena undang-undang melarang penindakan kalau belum secara nyata melakukan tindakan teror. Itu tidak bisa lagi dibiarkan, karena kita sudah darurat terorisme,” tegas Said.

Menyadari bahaya ISIS dan radikalisasi yang semakin meningkat, berbagai pihak di Tanah Air tidak tinggal diam. Salah satunya adalah KH Hasyim Muzadi, Sekjen ICIS

*Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi berpidato di sela pembukaan Konferensi Cendekiawan Muslim Internasional (ICIS) ke-4 di Aula Rektorat, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Senin (23/11).*

(International Conference of Islamic Scholars), yang menggalang pertemuan keempat ICIS pada 23-25 November 2015. Acara yang dihadiri 65 tokoh agama dan ulama berpengaruh dari 34 negara itu berlangsung di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Sekitar 500 ulama dari seluruh Indonesia, akademisi, dan duta besar negara sahabat juga turut serta.

Menurut Hasyim, konferensi ini adalah respons terhadap problematika umat Islam di tingkat global, dan upaya untuk mencari solusi terhadap krisis yang tengah melanda dunia Islam. Ekstremitas telah dieksploitasi di Timur Tengah, yang berdampak pada hancurnya agama dan negara. Hal ini diperburuk oleh perang kepentingan di kawasan itu, termasuk perebutan sumber daya alam seperti minyak, dan hegemoni politik.

Ditambahkannya, pemikiran moderat akan tergerus oleh pemikiran radikal dan liberal jika tidak dikelola dengan baik. Maka perlu ada upaya sistematis untuk menangani ancaman terorisme dan antiterorisme yang berwujud Islamofobia, dalam saat yang bersamaan. Publik internasional seolah dipaksa untuk memihak satu dari dua fenomena tersebut.

### Diiming-imingi Gaji Fantastis

Sedangkan Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, menjelaskan, warga Indonesia yang bergabung dengan gerakan radikal bisa jadi karena masalah ekonomi, unsur maskulinitas,

dan lingkungan sosialnya. Pada kasus ISIS, faktor ekonomi menjadi salah satu daya tarik utama untuk bergabung. ISIS mengiming-imingi gaji yang fantastis bagi para pengikutnya.

Sedangkan konsep religius yang melakukan aksi teror juga menarik minat para pemuda, karena dianggap sebagai bentuk maskulinitas, kejantanan. “Bergabung dengan ISIS mejadi wujud perlawanan para simpatisan, karena merasa terasing dari lingkungan sosialnya,” ujar Noor Huda.

Namun harus diakui, pemerintah belum optimal mengantisipasi radikalisme sehingga gerakan radikal semakin berkembang dan mengancam bangsa. Tindakan pemerintah baru sebatas memberi pernyataan di media. Maka pemerintah perlu lebih optimal dalam menjalankan program deradikalisasi, dan ideologi ekstrem yang disebar oleh kelompok radikal.

Direktur Deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), Irfan Idris menyatakan, program deradikalisasi ini memberikan pendidikan agama dan wawasan kebangsaan kepada ratusan terpidana terorisme di 13 lembaga pemasyarakatan. Upaya itu membuat Umar Patek, mantan anggota Jamaah Islamiyah, kembali menerima Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNPI).

BNPT pada awal 2015 juga meluncurkan dua situs untuk mencegah terorisme. Melalui situs Jalandamai.org dan Damailahindonesiaku.com, diharapkan orang dapat berbagi pengalaman, bagaimana mendapatkan rekan untuk bergabung melawan radikalisme agama.

Upaya menangkal ideologi ekstrem dari kelompok semacam ISIS kini masih terus diperjuangkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutyoso meminta masyarakat aktif menginformasikan indikasi radikalisme di lingkungannya. “Masyarakat tidak perlu ragu melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada kami,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. ◦



# Tambang Emas Terbesar di Dunia



**P**erusahaan pertambangan dunia, khususnya pengolahan bijih logam mulia secara rutin mengevaluasi kembali, menghitung ulang dan melaporkan cadangan tambang mereka dengan menerapkan variabel yang berbeda, dengan harga komoditas fluktuasi, dimana menjadi kontributor paling penting untuk meningkatkan atau menurunkan cadangan mereka.

Analisis tersebut meliputi berbagai eksplorasi penambangan emas yang saat ini aktif di seluruh dunia. Jumlah unit dan angka laporan yang terpisah dan yang memiliki evaluasi jumlah cadangan baru-baru ini diungkap oleh perusahaan tambang.

Pertanyaannya mengapa hanya cadangan yang diperhitungkan? Hal ini karena cadangan mineral menjadi bagian dari sumber daya mineral yang menunjukkan nilai ekonomis dalam kondisi pasar saat ini. Oleh karena itu, cadangan bijih emas menjadi relatif tepat mencerminkan perubahan dalam ekonomi "kesejahteraan" dari tambang itu sendiri.

Agar lebih akurat dalam perbandingannya, di dunia pertambangan mengenal dua metode eksplorasi tambang, - pertama metode tambang bawah tanah (underground

mining) dan - kedua metode tambang terbuka (surface mining). Kedua metode penambangan emas tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik cebakan emas.

Dalam mengidentifikasi "yang terbaik dalam pengolahannya", penelitian ini terfokus terhadap kelas bijih cadangan. Sementara itu, menyisihkan parameter penting lainnya seperti bijih tonase dan volume logam yang terkandung dalam bijih itu sendiri.

Berikut adalah daftar sepuluh tambang terbesar di dunia, tambang bawah tanah (underground mining) yang beroperasi di beberapa negara (dalam hal ini bersumber bijih, berdasarkan data tahun 2014-2015).

1. Tambang Fire Creek, di Amerika Serikat. Tambang Fire Creek yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan Klondex berada di wilayah Nevada, AS, mengandung 44,1 gram/ton cadangan emas. Ini menjadi tambang emas bawah tanah tertinggi di dunia.
2. Tambang Macassa, Kanada. Perusahaan tambang Macassa, di wilayah Ontario, Kanada dimiliki oleh perusahaan Kirkland Lake Gold Inc. Ini merupakan tambang tertua dan terkaya di Kanada. Memproduksi 24 juta ons emas

selama rentang waktu 86 tahun. Dan, mencatat sejarah dengan mengandung rata-rata 16,5 gram / ton. Dengan 22,2 gram / ton-dilaporkan mempunyai cadangan rata-rata emas. Kompleks tambang di daerah Selatan, operasional Macassa menjadi tempat kedua.

3. Tambang emas Kedrova, Rusia. Tambang Kedrova di Republik Buryatia, bagian dari Rusia, dimiliki oleh perusahaan pertambangan emas lokal Zapadnaya. Tambang emas bawah tanah ini menempati posisi ketiga tertinggi di dunia, dengan mengandung 22 gram/ton- kadar bijih emas cadangan. Tambang tersebut sekarang terfokus pada area Osinovaya - cadangan emas besar, yang memiliki eksplorasi potensi kenaikan yang signifikan dengan setidaknya 100 sumber yang sudah teridentifikasi.
4. Komplek penambangan Turquoise Ridge di wilayah Nevada, Amerika Serikat. Tambang emas bawah tanah yang dimiliki perusahaan Barrick Gold ini berada di peringkat empat, karena mengandung cadangan emas 16,9 gram/ ton. Selain itu, ada beberapa area disana yang memiliki potensi kandungan emas yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
5. Daerah pertambangan PT Nusa Halmahera Minerals meliputi:
  - A. Tambang Gosowong. Tambang Emas Gosowong adalah tambang terbuka (open pit mine) yang terletak di samping Sungai Tabobo, Halmahera Utara, Maluku Utara Provinsi, meliputi 1.608 ha bidang konstruksi. Selama tahun 1999-2002, tambang emas Gosowong menghasilkan 770.000 ons emas namun kini telah ditutup.
  - B. Tambang Toguraci. Tambang Toguraci terletak 2 km sebelah barat daya dari tambang Gosowong dan juga merupakan

tambang terbuka. Dengan luas bangunan 2.168 ha, tambang Toguraci telah menghasilkan 492,000 ons emas selama 2004-2008 namun kini juga ditutup.

6. Tambang emas Orcopampa, Peru. Tambang bawah tanah yang dimiliki oleh perusahaan Buenaventura ada di peringkat keenam dengan kandungan cadangan emas 15,8 gram/ ton.
7. Tambang Dvoinoye, di Rusia. Tambang bawah tanah ini memegang tempat ketujuh dengan kandungan cadangan emas 15 gram/ ton, menjadi bagian dari eksplorasi perusahaan Kinross Gold. Tambang ini terletak di Timur Jauh Rusia dalam Daerah Otonom Chukotka.
8. Tambang emas Pinson, AS. Operasional perusahaan Atna Resources di Nevada, Amerika Serikat, ada di posisi kedelapan dengan kandungan cadangan emas 13,8 gram/ ton di bawah tanah.
9. Tambang emas Midas, Nevada, AS. Bagian dari perusahaan pertambangan Klondex ini menempati peringkat kesembilan, lantaran mengandung cadangan emas 12,9 gram/ ton.
10. Tambang Pimenton, Chili. Tambang emas bawah tanah milik perusahaan Cerro Grande ini sukses di posisi kesepuluh dengan cadangan emas 11,1 gram/ton.

Tambang emas Freeport di Indonesia sering disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar, namun produksi di dunia menurun dan terhambat. Dan, sekarang ini berada di posisi 12 berdasarkan data Investing News Network tahun 2015.

“Pada tahun 2014-2015, output turun hanya menjadi 300 ribu ton, dibatasi terutama oleh keterlambatan dalam mengamankan persetujuan untuk tahun 2014 ekspor konsentrat, yang mengakibatkan penurunan sangat tajam dalam tingkat pengolahan bijih emas pada kuartal kedua untuk sekitar setengah tingkat kapasitas normal.” o Ferro Maulana

## 10 Tambang Emas Surface Mining Terbesar di Dunia



Setelah kami sajikan 10 tambang emas bawah tanah, berikut sepuluh tambang emas terbuka (surface mining) terbesar di dunia. Kami menggabungkan kelas bijih dan volume emas yang terkandung dalam cadangan, yang berasal dari cadangan bijih tonase.

1. Tambang emas Avlayakan, Khabarovsk, Timur Jauh Rusia. Bicara fakta, wilayah terpencil Avlayakan menghasilkan bijih emas bermutu tinggi. Di mana hasil dari pengolahan Khakanja ini kemudian diangkut melalui jalur laut dengan rute 1000 KM. Cadangan emas Avlayakan yang diproduksi perusahaan Polymetal, mengandung sekitar 18,2 gram/ ton.
2. Tambang Andy Well, Australia. Tambang emas terbuka milik perusahaan Doray Minerals di Australia Barat ini mampu memproduksi bijih emas bermutu tinggi dengan cadangan sekitar 16.1 gram/ ton.
3. Tambang Tskol, Rusia. Tambang yang masih bagian dari perusahaan Polymetal ini mengandung cadangan bijih emas sekitar 8,5 gram/ ton. wilayah tambang ini berada di Timur Laut Magadan, Timur Jauh Rusia.
4. Tambang Andorinhas, Brazil. Tambang yang dimiliki oleh perusahaan Troy Resources masih tetap beroperasi, dengan memiliki cadangan emas 5,8 gram/ ton.
5. Tambang Hislop, Kanada. Penambangan di distrik pertambangan emas Timmins, wilayah Ontario, Kanada ini mempunyai kandungan cadangan bijih emas 5,2 gram/ ton.
6. Tambang Albazino, Rusia. Penambangan emas di distrik Polina Osipenko, wilayah Khabarovsk Rusia Timur Jauh, menjadi proyek unggulan dari perusahaan Polymetal. Tambang ini berada di daerah sangat terpencil, Albazino, bebas dari hiruk pikuk kemacetan transportasi. Untuk mengalirkan listrik masih membutuhkan generator diesel.
7. Tambang Cukuralan, Turki. Tambang yang dimiliki perusahaan lokal Koza Altyn, mengandung cadangan bijih emas 4,5 gram/ ton.
8. Tambang Ozerny, Rusia. Tambang emas terbuka yang dipunyai perusahaan Polymetal di kompleks penambangan Khakanja mempunyai cadangan bijih emas sebesar 4,4 gram/ ton.
9. Pegunungan Carlton, di Queensland, Australia. Tambang ini memiliki kandungan cadangan emas sekitar 4,3 gram/ ton.
10. Tambang Gounkoto, Mali. Kompleks penambangan Randgold ini mempunyai kadar bijih dan volume emas sekitar 4,2 gram/ ton. o

# Pemimpin Ideologis

Hendrajit

**M**enyusul kisruh Freeport yang telah mengobok-obok kekompakan para menteri kabinet Pemerintahan Jokowi-JK, banyak kalangan yang berharap Jokowi sebagai presiden tampil memberi arahan kebijakan yang jelas, sekaligus meluruskan kesemrawutan seputar isu perpanjangan kontrak karya Freeport.

Namun ada juga kalangan yang skeptis, bahwa Jokowi kalaupun akhirnya nanti tampil di depan umum dan menyatakan sikap, hanya bereaksi atas dasar arus tekanan opini publik sekadar untuk membangun citra sebagai pemimpin pro rakyat.

Hal ini menggugah saya untuk membaca-baca lagi beberapa bahan pustaka terkait dua tipologi sosok pemimpin, yaitu pemimpin yang berideologi dan pemimpin pragmatis.

Ciri seorang pemimpin yang punya ideologi dan bukan pemimpin yang pragmatis, selalu berpikir menurut program, dengan menghadapkan diri pribadinya secara terus-menerus kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa sih arti sebenarnya tentang perkembangan sejarah itu?
2. Apa sih daya penggerak yang merobah kenyataan dalam kehidupan kita?
3. Bagaimana saya dapat menciptakan keterhubungan terhadap perubahan-perubahan itu, sehingga saya dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi bakat dan tujuan saya?

Seorang presiden seperti Charles de Gaulle dari Perancis, Jawaharlal Nehru dari India, Bung Karno dari Indonesia, sekadar sebuah contoh, seringkali bertindak demikian karena naluri pribadinya begitu kuat dalam memahami sejarah bangsanya, maupun sejarah dunia.

Tapi para pemimpin bertipe pragmatis, apalagi oportunistis, tidak berbuat demikian.

Sebaliknya, mereka dari tipe pragmatis ini sekadar memantulkan perkembangan

masyarakat mereka, yang spontan dan organis, yang sudah bertahun-tahun tidak pernah beristirahat sejenak untuk meneliti secara seksama tata organisasi masyarakat mereka, tujuan mereka dan arah yang mereka ingin tuju.

Tingkah laku dan aksi-aksi politik mereka dan tindakan mereka, cenderung bersifat pragmatis, yang dicetuskannya sebagai “reaksi” untuk menanggapi keadaan, jika dibandingkan dengan tindakan-tindakan para pemimpin yang berideologi.

Sebaliknya para pemimpin yang berideologi, Ideologi telah membekali para pemimpin jenis ini sebagai alat untuk meninjau dan menganalisis perubahan-perubahan sosial-politik yang sedang mereka hadapi. Sehingga langkah-langkah strategis yang diambil didasari kesiapan untuk mengantisipasi keadaan, bukan bereaksi secara impulsif (mengikuti dorongan hati yang tiba-tiba), terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi.

Para pemimpin yang berideologi memandang ideologi mereka mampu memberikan tinjauan dan tuntunan yang pasti dalam menilai situasi dan keadaan yang mereka hadapi, terlepas dari tujuan dasar dan pandangan-pandangan mereka sendiri secara pribadi.

Salah satu nilai positif dari ideologi terletak dalam kesadarannya untuk selalu menekankan pentingnya perkembangan strategi politik dan taktiknya secara seksama.

Karena mereka selalu menghubungkan taktik itu dengan strategi, maka perubahan-perubahan yang “irasional” maupun penyimpangan yang keblinger dalam tata laku mereka, pada kenyataannya tidak sebanyak terjadi di kalangan lawan-lawan mereka yang “pragmatis.”

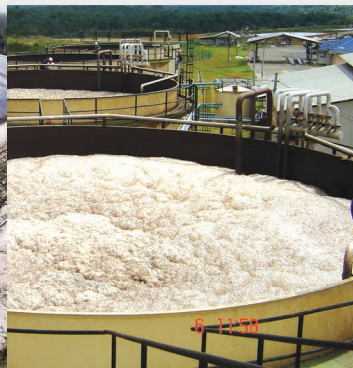
Nah, masuk golongan manakah gerangan Pak Jokowi? ◦



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**



[www.ebtke.esdm.go.id](http://www.ebtke.esdm.go.id)



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

# **DIREKTORAT BIOENERGI**

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng Jakarta Pusat 10320

☎ 021-39830077 📠 021-31901087 ✉ info@ebtke.esdm.go.id



# sejahtera di hari tua

**js** siharta

**js siharta** merupakan pilihan tepat bagi setiap kepala keluarga yang merencanakan kebutuhan :

- Persiapan dana untuk hari tua
- Persiapan dana untuk biaya pendidikan atau pernikahan anak
- Keperluan dana darurat
- Tabungan biaya kesehatan hari tua



Official Insurance Partner of Manchester City Football Club in Indonesia



**ASURANSI JIWA PENDIDIKAN PENSIUN INVESTASI ANUITAS KESEHATAN**

[www.jiwasraya.co.id](http://www.jiwasraya.co.id)

CALL 021 1500151